

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

**Handy Mulyaningsih
Erna Rochana**

Suluh Media

BAB 1

PENGERTIAN DAN UKURAN PEMBANGUNAN

1.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan istilah yang sudah sangat populer. Dari kota metropolitan hingga pelosok pedesaan, istilah ini sering diucapkan. Meskipun demikian, tidak berarti konsep, definisi, dan ukuran-ukuran pembangunan dipahami dan diterjemahkan sama. Masyarakat umum memahami pembangunan sebagai kegiatan membangun jalan, jembatan, merehabilitasi fasilitas umum seperti masjid bahkan fasilitas pribadi seperti rumah. Pada dasarnya mayoritas individu, kelompok, maupun institusi memahami pembangunan sebagai kemajuan material.

Seringkali timbul kesulitan untuk membedakan antara pembangunan (*development*) dengan pertumbuhan (*growth*). Pembangunan sering diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, dikatakan maju pembangunannya kalau tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi. Itulah sebabnya tolak ukur pembangunan adalah pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5% tiap tahun dalam jangka waktu 1960 - 1970 dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sesuai ketentuan PPB.

Sebetulnya, ada perbedaan antara pembangunan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah transformasi kuantitatif dalam kerangka sistem atau struktur yang ada, seperti kenaikan pendapatan perkapita,

kenaikan tingkat kesehatan masyarakat, kenaikan tingkat pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan pembangunan adalah transformasi kualitatif, yang seringkali terkait dengan perubahan struktur atau perubahan sistem yang ada. Misalnya perubahan dari struktur masyarakat agraris menuju masyarakat industri, perubahan struktur sosial dari tradisional ke modern, perubahan struktur politik dari otoriter ke demokratis, dan sebagainya (Moeljarto Tjokrowinoto, 1994).

Pembangunan selain sering dipahami sebagai perubahan secara kuantitatif yaitu adanya kemajuan material, juga dipahami sebagai perubahan linear ke arah kemajuan, seperti dari tingkat pendidikan rendah ke tinggi, dari miskin ke kaya, dari tingkat pendapatan rendah ke tinggi, dan sebagainya. Meskipun demikian, apabila diperhatikan pembangunan tidak selalu merupakan perubahan secara linear dan merupakan kemajuan material. Seperti kejadian yang dialami Bapak Selo Sumardjan, yang intinya ada sebagian masyarakat yang memahami pembangunan sebagai suatu malapetaka. Banyak fenomena pembangunan yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan yang berdampak pada terpinggirkannya masyarakat (*marginalisasi*). Banyak contoh yang dapat menunjukkan fenomena tersebut seperti pembangunan berbagai perusahaan di Provinsi Lampung diwarnai dengan terjadinya penggusuran yang mengakibatkan hilangnya tanah sekaligus rumah dan pekerjaan serta berbagai kebutuhan sosial lain yang selama ini sudah terpenuhi dari lingkungannya seperti keakraban dengan tetangganya, saling ketergantungan antar tetangganya, dan lain sebagainya.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto, ada dua kategori interpretasi tentang pembangunan:

1. Pembangunan adalah fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia, seperti dari jaman batu ke jaman logam, atau jaman prasejarah ke jaman sejarah. Pembangunan sebagai cermin kemajuan peradaban manusia ini merupakan pembangunan yang terjadi secara evolutif dan alamiah. Secara evolutif karena berjalan secara perlahan-lahan dari generasi ke generasi sehingga perubahan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya disintegrasi antara nilai-nilai

lama dengan nilai-nilai baru. Secara alamiah, karena perubahan yang terjadi tidak direncanakan.

2. Pembangunan sebagai *planned societal change* (perubahan sosial yang terencana). Pengertian pembangunan seperti ini berkembang pada abad xx terutama sesudah Revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917, dan terutama sekali ketika muncul negara-negara baru merdeka setelah PD II di mana biasanya diterapkan sistem ekonomi campuran (antara *planned economy* dan *free economy*). Pembangunan sebagai perubahan sosial yang direncanakan merupakan konsep yang tidak bebas nilai (*value loaded*). Masing-masing masyarakat di suatu negara akan merencanakan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini baik oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian pembangunan bersifat *culture specific*, atau tergantung pada kultur masing-masing negara. Selain itu, pembangunan juga bersifat *time specific*, artinya dalam suatu negarapun pembangunan dapat didefinisikan berbeda dalam kurun waktu yang berbeda.

1.2 Ukuran Pembangunan

Oleh karena pengertian pembangunan ada banyak ragam, maka ukuran pembangunan juga beragam. Ukuran pembangunan penting untuk diketahui sebagai alat untuk mengukur apakah pembangunan yang telah dilaksanakan telah berjalan, meningkat, dan memberikan manfaat bagi semua warga negara yang hidup di suatu wilayah tertentu. Beberapa macam ukuran keberhasilan pembangunan adalah:

1. GNP

Kekayaan bangsa atau negara, yang biasa disebut dengan istilah GNP (*Gross National Product*). Negara dikatakan berhasil pembangunannya kalau GNP nya naik, sebaliknya dikatakan tidak berhasil dalam pembangunannya kalau GNP turun. Berpijak dari ukuran ini, banyak negara yang berusaha untuk meningkatkan GNP dengan berbagai cara seperti dengan menarik investor sebanyak-banyaknya sehingga negara akan memperoleh pemasukan, menarik pajak dan retribusi, mengeksploitasi sumberdaya alam, dan sebagainya.

2. Pemerataan

Oleh karena ukuran pembangunan dengan menggunakan kekayaan bangsa, maka hal itu tidak dapat menjadi ukuran per-individu. GNP tinggi tidak selalu mencerminkan pendapatan masyarakat tinggi. Bisa terjadi GNP tinggi diperoleh dari sebagian kecil anggota masyarakat yang pendapatannya sangat tinggi sehingga mampu mendongkrak sebagian besar anggota masyarakat yang pendapatannya kecil. Itulah sebabnya ukuran pembangunan diperbaiki dengan menggunakan ukuran pemerataan. Pembangunan dikatakan berhasil kalau GNP tinggi dengan pemerataan tinggi.

Pembangunan dikatakan tidak merata (ketimpangannya sangat tinggi) kalau 20% penduduk terkaya meraih lebih dari 50% GNP; apabila 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% GNP, ketimpangan yang ada dianggap mencolok; apabila 40% penduduk termiskin menerima 12% sampai 17% ketimpangan dianggap sedang; apabila penerimaan golongan ini lebih dari 17% maka ketimpangan dianggap lumayan kecil (Djoyohadikusuma, dalam Arief Budiman, 4).

3. Index Gini

Cara lain untuk mengukur ketimpangan adalah dengan menggunakan Index Gini. Index ini diukur dalam angka antara 0 dan 1. Dikatakan terjadi ketimpangan tinggi apabila Index Gini sama dengan 1, dan dikatakan tidak ada ketimpangan apabila Index Gini 0. Dengan kata lain kalau Index Gini semakin mendekati 0, maka ketimpangan semakin kecil, sebaliknya semakin mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi (Djoyohadikusuma). Todaro menyatakan bahwa apabila index gini $> 0,5$, maka dikatakan terjadi kesenjangan pemerataan yang tinggi. Apabila index Gini antara 0,4 dan 0,5 dikatakan sebagai kesenjangan pemerataan kecil.

4. Kualitas Kehidupan

Dari hasil kajian Todaro mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, diperoleh kejelasan bahwa tidak selalu terjadi konsistensi antara ukuran kekayaan dan pemerataan dengan PQLI. Adakalanya negara yang GNP nya tinggi ternyata PQLI nya rendah. Hal ini menunjukkan

bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan GNP tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata. Itulah sebabnya untuk mengukur keberhasilan pembangunan selain menggunakan ukuran kekayaan dan pemerataan, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan ukuran kualitas kehidupan (PQLI = *Physical Quality of Life Index*), seperti dinyatakan Moris (dalam Arief Budiman). Ada 3 indikator penting untuk mengetahui kualitas kehidupan:

- a. Rata-rata harapan hidup bayi sesudah berumur satu tahun
- b. Rata-rata jumlah kematian bayi
- c. Rata-rata jumlah prosentase yang melek huruf dan buta huruf.

Rata-rata harapan hidup berada di antara 28 tahun hingga 77 tahun. Apabila rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun, maka diberi angka harapan hidup 100, dan apabila rata-rata harapan hidup 28 tahun maka diberi angka harapan hidup 1. Negara dikatakan berhasil pembangunannya kalau rata-rata harapan hidup semakin mendekati 77 tahun. Rata-rata harapan hidup tinggi terjadi ketika kualitas hidup masyarakat sudah tinggi, seperti tingkat kesehatan individu dan lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi ini masih didukung dengan tingkat pendidikan serta kemauan pemerintah untuk mengubah paradigma yang selama ini dipergunakan sebagai acuan pembangunan. Rata-rata kematian bayi adalah 9 hingga 229 tiap 1000 bayi. Angka 100 diberikan apabila rata-rata kematian bayi 9, dan angka 1 apabila rata-rata kematian bayi mencapai 229 tiap 1000 bayi. Rata-rata kematian bayi yang rendah yaitu mendekati 9 menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Untuk mencapai kondisi ini maka sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan tingkat pendidikan ibu, serta kepedulian pemerintah untuk mengalokasikan pendapatannya pada berbagai faktor yang berhubungan dengan upaya menurunkan tingkat kematian bayi, sangat dibutuhkan. Untuk indikator ketiga, angka 100 diberikan apabila rata-rata prosentase melek huruf mencapai 100%, dan angka 0 apabila semua buta huruf. Untuk menurunkan presentase buta huruf,

Indonesia menyelenggarakan program Kejar Paket A, sistem belajar 9 tahun, dan sebagainya. Perhitungan ke tiga angka tersebut, yaitu angka kematian bayi, angka buta huruf, angka harapan hidup, adalah angka PQLL yang besarnya antara 1 hingga 100.

5. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan Lingkungan merupakan salah satu ukuran untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Asumsi dasar dari munculnya ukuran ini adalah pembangunan semakin lama semakin menurun keberhasilannya karena kelangsungan pembangunan tidak terjaga. Dengan kata lain, meskipun tingkat kekayaan, pemerataan, serta PQLL, sudah tinggi, tetapi dilakukan dengan cara mengeksploitasi sumberdaya alam sebesar-besarnya tanpa memperdulikan masa depan, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka negara tersebut dikatakan negara yang tidak berhasil pembangunannya. Bagaimanapun kecepatan lingkungan untuk kembali seperti semula (dalam keadaan tidak rusak) sangat lambat, dibandingkan dengan kecepatan lingkungan untuk menjadi rusak. Kerusakan sumberdaya alam pada akhirnya akan mengakibatkan suatu negara akan jatuh miskin.

6. Keadilan Sosial dan Kestinambungan

Faktor keadilan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan argumentasi bahwa keadilan sosial tidak hanya merupakan aspek moral tetapi juga merupakan faktor untuk menentukan kelestarian pembangunan. Tidak adanya keadilan sosial yang dicirikan dengan adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam antara yang kaya dengan yang miskin, berpotensi untuk menimbulkan kerawanan sosial. Kerawanan sosial ini berpotensi untuk menimbulkan kerusakan sosial yang dapat mengganggu lajunya pembangunan.

7. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Suatu negara dikatakan berhasil pembangunannya apabila tidak menimbulkan kesenjangan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain pembangunan dikatakan berhasil kalau menimbulkan kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian kesetaraan dan keadilan jender (KKJ)

equality (persamaan kuantitas). Apabila hal tersebut sulit tercapai, maka metode perjuangan yang dipakai adalah pendekatan sosial konflik, yaitu mencapai kebebasan dan persamaan sosial menyingkirkan pihak lawan (laki-laki). Untuk mencapai tujuan tersebut maka disediakan program khusus (*affirmative action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan agar termotivasi untuk merebut posisi yang selama ini didominasi laki-laki. Akibatnya dapat diduga yaitu timbul reaksi negatif dari kaum laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku *male backlash*. Keberhasilan sebagian masyarakat barat dalam kesetaraan perempuan telah menimbulkan perubahan sikap dan perilaku perempuan bergaya maskulin seperti agresif, egoistis, kasar, dan tidak mau menikah, tidak bersedia hamil, menyusui, bahkan muncul gerakan lesbian.

b. Aliran *nature*

Aliran ini menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis sebagai hal yang kodrati. Dalam hal ini status dan peran perempuan ada yang diperoleh sejak lahir karena kodratnya sehingga tidak dapat dipertukarkan. Pendekatan ini membuka mata banyak pihak atas berbagai kelemahan aliran *nurture*.

Melalui aliran *nature*, maka dikembangkanlah konsep pemberdayaan perempuan (*women empowerment*), yang merupakan program khusus (*affirmative action*) untuk memperbaiki posisi dan kondisi perempuan. Dalam hal ini perempuan lebih diberdayakan agar dapat memberikan sumbangan ke dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara tanpa menimbulkan konflik. Oleh karena itu perlu ada kesepakatan dan pembagian tugas (*division of labor*), sehingga tercapai kehidupan yang harmonis.

Di samping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan merupakan jenis kelamin yang tidak perlu dipertentangkan.

hubungan antara keduanya adalah saling melengkapi. Perbedaan biologis dan sosial antara keduanya adalah merupakan realitas kehidupan manusia. Karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan jender harus memperhatikan konteks dan situasi bukan berdasarkan perhitungan (*quota*) dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurang-kurangnya 3 konteks kehidupan seseorang yaitu keluarga, masyarakat, agama. Sedang situasional menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan jender tidak dapat diberlakukan sama di semua strata masyarakat.

Dengan demikian perbedaan bukan alasan untuk menundukkan satu sama lain, tetapi untuk saling melengkapi dan bekerjasama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Para aktivis aliran keseimbangan aktif melancarkan kampanye tentang perlunya kembali nilai-nilai luhur pembentukan keluarga (*back to the family values*) Yang penting bagi keluarga modern adalah perempuan memiliki *bargaining position* (posisi tawar) yang sama dengan laki-laki sehingga setiap keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan kebersamaan.

Kesetaraan dan keadilan jender merupakan kondisi yang harus diperjuangkan. Dari hasil konferensi di Beijing 1995 berhasil diidentifikasi sejumlah masalah yang banyak dihadapi perempuan di sebagian besar dunia yang dikenal dengan keprihatinan Beijing (1995), di antaranya:

- 1) Kemiskinan perempuan karena kemiskinan struktural akibat kebijakan pembangunan dan sosial budaya yang berlaku.
- 2) Keterbatasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan
- 3) Masalah kesehatan dan hak reproduksi perempuan yang kurang mendapat perlindungan dan pelayanan yang memadai
- 4) Kekerasan fisik terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di tempat kerja tanpa mendapatkan perlindungan secara hukum

- 5) Perempuan di tengah wilayah konflik militer dan kerusuhan banyak yang menjadi korban kekerasan dan kekerasan fisik yang bertikai meskipun sudah dijamin oleh Konvensi Geneva 1949
- 6) Terbatasnya akses kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, termasuk memperoleh modal dan pelatihan
- 7) Keikutsertaan perempuan dalam merumuskan dan pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat dan negara masih terbatas
- 8) Keterbatasan kelembagaan dan mekanisme yang dapat memperjuangkan perempuan dalam sektor pemerintah maupun non pemerintah
- 9) Perlindungan dan pengayoman terhadap hak-hak asasi perempuan secara sosial maupun hukum masih lemah
- 10) Keterbatasan akses perempuan terhadap media massa sehingga ada kecenderungan media informasi menggunakan tubuh wanita sebagai media promosi dan eksploitasi murahan
- 11) Kaum perempuan paling rentan terhadap pencemaran lingkungan seperti air bersih, sampah industri, dan lingkungan lain.
- 12) Keterbatasan perempuan dalam mengembangkan potensi dirinya dan tindak kekerasan terhadap perempuan

Di samping itu, terdapat beberapa hal yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan budaya di berbagai suku bangsa di Indonesia antara lain:

1. Masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan terutama di tempat kerja dan skala penggajian
2. Banyak terjadi tindak kekerasan, perkosaan, kekerasan fisik terhadap perempuan tanpa mendapat perlindungan hukum yang memadai
3. Sindikat penipuan dan perdagangan perempuan untuk dipekerjakan dengan penghasilan yang menjanjikan

4. Eksploitasi tubuh, dan pelecehan seksual atau pornografi yang dilakukan dengan alasan seni dan pariwisata
5. Budaya kawin muda yang diikuti perceraian yang tinggi
6. Budaya melamar dengan antaran dan maskawin yang mahal sehingga menimbulkan persepsi jual beli perempuan
7. Pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang salah dan bercampur aduk dengan budaya yang tidak berpihak terhadap perbaikan status perempuan
8. Diskriminasi dalam kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja
9. Pemaksaan dalam penggunaan kotrasepsi atau kurangnya jaminan bila terjadi kegagalan sehingga banyak merugikan perempuan

Semua persoalan yang dihadapi, dialami, dan dirasakan perempuan, merupakan keprihatinan bersama dan perlu diperjuangkan agar kehidupan yang harmonis dalam kesetaraan dan keadilan jender tercapai. Untuk itulah maka kebijakan dan program pemberdayaan perempuan perlu dilakukan. Adapun prinsip dasar pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- a. Menghargai keragaman
- b. Non dikotomis (konflik)
- c. Dengan Sosialisai dan advokasi
- d. Menghargai pilihan setiap orang/keluarga
- e. Menghargai HAM dan Demokrasi
- f. Pendekatan Budaya dan nilai agama.

-oo0oo-

BAB 2

PERKEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI HASIL PROSES

Ada yang berpandangan bahwa masyarakat berkembang sebagai hasil proses secara internal, masyarakat berkembang sebagai hasil interaksi, dan masyarakat berkembang sesuai dengan konsep diri.

Secara umum pembahasan tentang perkembangan masyarakat termasuk dalam kajian perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri memiliki banyak konsep seperti:

- a. Menyamakan perubahan sosial dengan seluruh bidang penyelidikan sosiologi
- b. Perubahan di dalam organisasi sosial, dan mengesampingkan kultur
- c. Perubahan fenomena sosial yang dapat diamati
- d. Perubahan secara keseluruhan di dalam struktur sosial
- e. Perubahan di dalam komunitas lokal tertentu
- f. Perubahan profil umum dari siklus peradaban manusia (Hoogvelt, 4)

Sebetulnya dari banyak konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan evolusi mencakup aspek pertumbuhan (*growth*) seperti pada fenomena sosial yang dapat diamati. Istilah pertumbuhan hanyalah istilah yang menunjuk pada perubahan dari sisi kuantitatif seperti pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, peningkatan pendidikan, pertumbuhan pendapatan, dan sebagainya. Sedangkan istilah per-

kembangan menunjuk pada perubahan dari sisi kualitatif, seperti struktur nilai, norma, pranata sosial, stratifikasi sosial, dan sebagainya.

Seringkali perubahan kuantitatif diikuti dengan perubahan kualitatif seperti pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perubahan di dalam diferensiasi dan spesialisasi sosial seperti pada pola pengasuhan anak, perubahan nilai kerja, perubahan nilai anak, dan sebagainya. Perubahan pola pengasuhan anak dari pengasuhan oleh keluarga besar ke keluarga kecil, perubahan nilai kerja dari kerja sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan menjadi kerja untuk meraih prestasi, merupakan contoh perubahan yang sifatnya kualitatif yang mengikuti perubahan yang sifatnya kuantitatif seperti pertumbuhan penduduk.

Perlu dipahami bahwa konsep perkembangan tidaklah selalu berarti terarah pada kemajuan, modernisasi, atau perubahan dari agraris ke industrial. Adakalanya perkembangan yang terjadi di masyarakat justru menunjukkan ke arah kemunduran seperti menjadi semakin miskin, kembali berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai tradisional seperti nilai mendahulukan selamat (*safety first*) terhadap seluruh anggota komunitas, dan sebagainya. Perilaku masyarakat dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai rasionalitas, dan efektivitas adalah perilaku tradisional atau menunjukkan keterbelakangan.

Ada beberapa perspektif yang mengkaji pembangunan sebagai hasil proses internal yaitu perspektif evolusi dan neo-evolusi. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan satu per satu.

2.1 Perspektif Evolusi

Perspektif ini menekankan perkembangan masyarakat sebagai hasil pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dengan sendirinya (*autonomous*) (Hoogvelt, dalam Alimandan, 1995). Aspek perencanaan adalah hal yang dikesampingkan di dalam proses evolusi ini. Selain itu konteks sosial seperti historis dan interaksi sosial dengan masyarakat lain dianggap tidak merupakan halangan bagi perkembangan masyarakat. Pandangan seperti ini dapat ditemukan pada teoritis klasik penganut

aliran evolusi seperti Spencer, Durkheim, Ferdinand Tonnies, Morgan, dan lain-lain.

Sebagai contoh, ada 2 proposisi dasar teori Spencer:

1. Berbagai bentuk kehidupan sosial berkembang dari bentuk aslinya yang kecil dan sedikit ke jumlah yang besar. Proposisi ini menekankan perkembangan aspek kuantitatif yang terjadi sebagai hasil proses internal.
2. Terjadi perkembangan dari bentuk yang sederhana ke kompleks. Jadi ada perubahan kualitatif yang mengiringi perubahan kuantitatif sebagai hasil proses internal.

Seperti halnya Spencer, Durkheim juga menyatakan bahwa perubahan kuantitatif akan diiringi dengan perubahan secara kualitatif. Hal ini tampak pada pemikirannya tentang perubahan dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, yang diakibatkan peningkatan pembagian kerja karena adanya pertumbuhan penduduk, Tonnies, menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi melalui peningkatan hubungan sosial dan perubahan sifat serta bentuk hubungan sosial berupa perubahan dari organisasi komunal ke organisasi perserikatan.

Kelemahan model evolusi ini:

1. Asumsi bahwa perubahan sosial terjadi secara linear (satu arah): yaitu dari masyarakat tradisional ke modern. Konsep Spencer tentang masyarakat tradisional adalah yang bentuknya masih asli, kecil dan sederhana, sedangkan Durkheim menggunakan istilah masyarakat yang solidaritasnya mekanis, sedang Tonnies menggunakan istilah masyarakat yang organisasinya sederhana. Melalui proses internal, masyarakat tradisional akan berubah menjadi modern.
2. Kurang perhatian terhadap jembatan perubahan dari primitif ke modern, karena tidak mungkin ada lompatan secara langsung dari tradisional ke modern. Bagaimanapun proses evolusi akan bergerak secara perlahan-lahan sehingga perubahan dari tradisional ke modern tidak akan terjadi seketika. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dari agraris ke industri, tidak

menunjukkan perubahan yang seketika menuju negara industri. Di dalam proses perubahan bahkan ditemukan adanya ciri-ciri tradisional yang masih hidup di masyarakat, dan juga ditemukan ciri-ciri modernitas.

2.2 Perspektif Neo Evolusi

Perspektif Neo Evolusi ini berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan perspektif evolusi. Pada dasarnya perspektif ini menekankan pada peningkatan aspek adaptasi masyarakat sebagai ciri masyarakat yang lebih maju, seperti yang dinyatakan Parsons bahwa aspek adaptasi masyarakat Barat lebih tinggi dari masyarakat lainnya. Beliau merumuskan pengertian evolusi sebagai proses peningkatan differensiasi dan kompleksitas organisasi sehingga adaptasi terhadap lingkungan semakin besar dibandingkan pada organisasi yang sederhana. Sahlin dan Sverin menyebutkan beberapa ciri masyarakat yang tingkat evolusinya sudah tinggi:

1. Mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara yang lebih variatif dan efisien
2. Semakin bebas dari pengaruh lingkungan
3. Masyarakat yang lebih adaptif akan mendominasi dan menggantikan masyarakat yang kurang maju

Adapun ciri-ciri masyarakat yang kemampuan adaptasinya tinggi adalah: masyarakat yang sudah terdifferensiasi dan terspesialisasi serta memilih cara-cara yang efektif untuk mengintegrasikan seluruh bagian-bagiannya. Jika differensiasi menghasilkan peningkatan penyesuaian diri maka diperlukan rasionalisasi baru untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan substruktur yang berbeda. Integrasi ini diperlukan agar setiap substruktur yang berbeda dapat meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dalam melaksanakan fungsi utamanya pada struktur yang lebih tersebar (Parson).

Parson menggambarkan perkembangan masyarakat dalam 3 tingkatan utama: *primitive intermediate modern*. Atau diperinci lagi menjadi

primitive advance primitive and archaic historic intermediate seedbed societies modern societies. Perbedaan ini didasarkan atas artikulasi pengembangan fungsi integrasi. Ada 2 fungsi integrasi yaitu mendefinisikan identitas sosial dan kriteria keanggotaan dalam komunitas. Kedua, menciptakan tata normatif yang akan mengatur hubungan antar anggota masyarakat.

Tingkatan Primitif	Tingkat <i>Intermediate</i>	Tingkatan Modern
1. Tidak ada differensiasi fungsional	1. Mulai ada differensiasi sosial dan fungsional	1. Differensiasi sosial dan fungsional
2. Keanggotaan komunitas didasarkan atas keturunan dan perkawinan	2. Kriteria umum	2. Kriteria umum
3. Berkembang norma askriptif	3. Berkembang norma formal	3. Norma formal yang berjalan
4. Kewajiban dan hak istimewa didasarkan atas umur, jenis, kelamin, keturunan, pertalian keluarga		

Meskipun kritik tajam dilontarkan pada aliran evolusi, yang intinya menyatakan bahwa teori evolusi tidak banyak perhatiannya terhadap perubahan sosial. Anehnya perspektif struktural fungsional justru menjadi landasan pengembangan teori modernisasi, yaitu teori yang membahas tentang perubahan sosial.

Pendekatan Parson tentang kemampuan adaptasi bagi setiap masyarakat ketika menghadapi perubahan ini menggambarkan suatu perkembangan masyarakat yang terjadi tanpa dominasi, eksploitasi apalagi konflik. Hal ini berbeda dengan pendekatan Sahlin dan Service yang lebih tegas menyatakan bahwa perkembangan masyarakat melalui difusi kultural cenderung terjadi melalui dominasi dan eksploitasi kultur yang satu terhadap yang lain. Sahlin dan Service mengemukakan tiga kemungkinan ketika terjadi difusi kultural:

1. Kultur yang lebih rendah dimusnahkan oleh kultur yang lebih tinggi melalui penaklukan militer
2. Kultur yang lebih rendah mengadaptasi kultur yang lebih tinggi
3. Kultur yang lebih rendah mengisolasi diri (dalam Alimandan, 1993)

Ada beberapa penyebab perspektif struktural fungsional sangat berpengaruh di negara berkembang:

1. Memberikan gambaran bahwa untuk mencapai tingkat sosio ekonomi yang lebih tinggi tidak harus dilakukan secara radikal. Hal ini disebabkan karena sasaran formal perspektif struktural fungsional bukanlah perubahan sosial tetapi proses perubahan sosial untuk menuju masyarakat yang maju. Sifat evolutif dan diiringi dengan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam setiap dinamika perubahan dalam arti tanpa ada konflik sosial, merupakan daya tarik bagi pengambil keputusan untuk membangun negaranya.
2. Proses yang harus dilalui negara berkembang untuk menjadi maju adalah dengan cara meniru model ekonomi dan teknologi negara maju. Kemajuan ekonomi dan teknologi akan merangsang perubahan komponen struktural lainnya seperti bidang politik, sosial, dan kultur. Misalnya penggunaan model ekonomi kapitalis, menuntut perubahan bidang politik, sosial, dan kultural yang lebih egaliter. Ekonomi kapitalis menuntut pengurangan campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, menuntut kesiapan sosial dan kultural dari masyarakat untuk berani bersaing.

	Tradisional	Modern
Motivasi tindakan	<i>Affective reward</i>	<i>Affectively neutral reward</i>
	<i>Self orientation</i>	<i>Collective orientation</i>
Standard nilai isi peraturan	<i>Particularistic</i>	<i>Universalistic</i>
Nilai peranan yang sedang berlangsung	<i>Ascriptive</i>	<i>Achievement</i>
Bidang hubungan peranan	<i>Functionally diffuse</i>	<i>Functionally specific</i>

Affective reward adalah motivasi tindakan atas dasar *reward* (imbalan) kasih sayang (ada hubungan pribadi di dalamnya), seperti mengerjakan

sesuatu lebih baik karena ada imbalan kasih sayang. *Affective neutral reward* adalah motivasi tindakan atas dasar *reward* yang tidak atas dasar hubungan pribadi, dengan kata lain sifatnya netral. *Self orientation* adalah mengutamakan motivasi pribadi dalam mengerjakan sesuatu dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Partikularistik, pengutamaan kepentingan pada obyek atau tingkatan sosial yang khusus. Nepotisme termasuk bagian dari orientasi partikularistik. *Universal partikularistik* adalah orientasi yang tidak mengutamakan pada obyek dan tingkatan sosial yang khusus. Birokrasi yang modern, yang mengesampingkan aspek pribadi dan keluarga, adalah contoh orientasi *universalistic*. Masyarakat yang tradisional juga bercirikan penilaian peranan atas dasar variabel *ascriptive*, yaitu penilaian peranan atas dasar ciri-ciri fisik dan *sosial actor*. Jadi dasar penilaian yang menonjol adalah: siapa orangnya, apa latar belakang sosialnya, apakah laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dan sebagainya. Masyarakat modern, menilai peranan atas dasar variabel *achievement*, yaitu atas dasar prestasi. Selain berbagai variabel yang telah dijelaskan, pada masyarakat tradisional berkembang hubungan antar aktor yang berbentuk *functionally diffuse*. Sedangkan dalam masyarakat modern, hubungan antar aktor berbentuk *functionally specific*. Hubungan antara majikan dan buruh pada masyarakat tradisional bersifat *functionally diffuse*. Dalam hal ini hubungan antara majikan dengan buruh tidak hanya merupakan hubungan antara atasan dan bawahan di dalam hubungan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai guru, bapak, yang siap melindungi bawahannya bahkan keluarganya di luar hubungan kerja sekalipun.

Sistem ekonomi dan teknologi yang akan dikembangkan di negara yang belum maju, menuntut persyaratan seperti spesialisasi mata pencaharian, penerapan rasionalitas ekonomi, penerapan peralatan secara rasional, yang semua itu menuntut masyarakat dengan variabel pola: *achievement oriented*, *universalistic*, dan *affective neutral*. Untuk mengembangkan sistem sosial, budaya, politik, yang mendukung sistem ekonomi dan teknologi yang akan dikembangkan, maka dilakukan difusi pola-pola tindakan asli, diantaranya adalah:

1. Penerapan nilai rasionalitas terhadap sumber-sumber ekonomi dengan cara mengembangkan cara-cara produksi yang lebih efisien dan efektif.
2. Mobilitas geografis tenaga kerja, bersamaan dengan berkembangnya spesialisasi pekerjaan, yang akan diikuti dengan perubahan pola *extended family* menjadi *nuclear family*.
3. Meningkatkan mobilitas sosial secara geografis dan *vertical*. Pada tahap ini status sosial seseorang lebih ditentukan oleh faktor prestasi dibandingkan dengan keturunan. Sehubungan dengan itu, maka dikembangkan sistem pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
4. Mobilitas faktor produksi (*capital* dan tanah), tergantung pada pelebagaan norma baru, dalam hal ini hak memperjualbelikan kekayaan milik individual atau milik negara.
5. Penerapan secara universal prinsip mengejar keuntungan dalam organisasi produksi modern.
6. Hubungan peranan dalam lingkungan perekonomian modern harus didasarkan atas kontrak.
7. Diperlukan perluasan pasar barang konsumsi, karena upah dan barang yang dapat dikonsumsi merupakan motivasi orang bekerja di dalam sistem perekonomian modern (dalam Hoogvelt).

BAB 3

TEORI PEMBANGUNAN

Pengkajian tentang pembangunan selalu menyertakan adanya dikotomi antara negara maju dengan terbelakang atau negara kaya dengan negara miskin, negara industri atau negara agraris. Pembangunan negara-negara miskin, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kehidupan penduduknya merupakan suatu masalah bagaimana mereka mengejar kehidupan negara kaya baik melalui usaha sendiri maupun dengan bantuan negara lain.

Negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang sedang berupaya untuk mengatasi kemiskinannya dan berusaha mengejar ketertinggalannya dari negara maju dan modern, biasanya terjebak dalam 3 hal:

1. *Demonstration effect*, yaitu keinginan untuk meniru negara maju, atau dijadikan negara maju sebagai model masyarakat yang akan dicapai. Model kapitalisme, negara industri, adalah model yang banyak ditiru. Bahkan peniruan terhadap negara maju juga dilakukan pada bidang politik dan pemerintahan, seperti pemerintahan yang demokratis yang membagi kekuasaan dalam tiga bidang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana masing-masing bidang independen terhadap yang lain. Model sistem pemerintahan dengan tipe birokrasi yang rasional, juga merupakan model yang banyak ditiru. Bahkan gaya hidup negara maju menjadi model bagi negara miskin agar dikatakan menjadi kaya

dan modern. Konsumsi terhadap berbagai barang dari negara sekunder, tersier, dan sangat tersier, mengikuti gaya negara yang maju dan kaya. Makan ala McDonald menjadi idola dan hidup, Marilyn Monroe dan banyak artis lain menjadi model rambut, pakaian, gaya hidupnya seperti model kebiasaan, dan sebagainya.

2. *Compression effect*, keinginan untuk mewujudkan model yang ingin dicapai dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh menuju masyarakat industri, Indonesia menginginkan jangka panjang hanya dalam satu periode pembangunan waktu beratus-ratus tahun negara Eropa dan Amerika membutuhkan waktu beratus-ratus tahun.
3. *Fusion effect*, mencoba menggabungkan unsur-unsur yang ada *free economy* dengan *planned economy* sebagai upaya untuk mewujudkan model yang ingin dicapai. Oleh karena mencoba menggabungkan keduanya, Indonesia menyatakan tidak kapitalis dan tidak tetapi Pancasila.

Kecenderungan munculnya ke tiga hal tersebut tidak terlepas dari situasi historis munculnya teori pembangunan yang selalu diliputi dengan pertentangan antara blok Barat dan blok Timur. Sejarah teori pembangunan memang tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik dunia. Setelah periode PD II muncul 2 blok negara adikuasa yaitu Blok Barat dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya dan Blok Timur dengan Rusia sebagai pemimpinnya. Masing-masing blok memiliki model pembangunan. Blok Barat mengembangkan teori modernisasi, yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berkembang menjadi maju apabila kultur masyarakat berubah, mengikuti sistem Barat seperti sistem politik yang demokratis, ekonomi kapitalis. Blok Timur mengembangkan teori sosialis yang dikembangkan atas asas teori teori Marxis.

Berbeda dengan teori modernisasi, teori sosialis ini menyatakan bahwa *underdevelopment* atau keterbelakangan disebabkan oleh ketimpangan dalam hubungan produksi dan munculnya imperialisme Barat. Dengan kata lain, teori sosialis tidak mengatakan bahwa keterbelakangan disebabkan oleh kultur tetapi struktur.

Persaingan kedua blok tersebut juga berdampak pada pemberian bantuan luar negeri negara-negara berkembang. Pada akhir tahun 1950-an hingga 1960-an, pemberian bantuan luar negeri ditentukan atas dasar posisi militer suatu negara. Pada akhir tahun 1980-an terjadi perubahan persyaratan untuk memperoleh bantuan luar negeri. Pada periode ini negara yang menerima bantuan luar negeri tidak didasarkan atas status militer tetapi didasarkan atas masalah HAM dan lingkungan. Negara yang dianggap melanggar HAM dan merusak lingkungan terancam tidak memperoleh bantuan luar negeri. Perubahan ini terjadi karena persaingan antara kedua blok tidak ada lagi. Rusia secara ideologis dan ekonomis, serta politis telah hancur, sehingga tinggal satu blok yang berkuasa. Oleh karena itu tinggal satu model teori pembangunan. Semua negara bahkan yang dahulu menolak teori modernisasi kini harus mengakui keunggulannya. Market ekonomi dan swastanisasi menjadi model pembangunan di semua negara di dunia yang diharapkan membawa kemakmuran bagi manusia. Vietnam dan Cina yang secara politis adalah negara komunis, tetapi dasar ekonominya adalah kapitalisme.

Upaya negara miskin atau negara berkembang untuk menjadi maju dilakukan dengan cara mencari akar kemiskinannya yang menjadi hambatan dalam pembangunan. Seperti di Amerika Latin, sistem feodalisme yang mengakibatkan tumbuhnya struktur sosial di mana elite militer menjadi pemilik tanah dan tidak memperlihatkan adanya komitmen untuk melakukan investasi dalam pembangunan industri, petani tanpa hak atas tanah, merupakan sistem yang tidak cocok untuk menuju masyarakat modern.

Di India, struktur sosial yang tertutup, larangan penyembelihan sapi sehingga membatasi budidaya sapi, ajaran agama berupa penyerahan diri secara fatalis kepada Yang Kuasa, merupakan hambatan pembangunan. Di Indonesia, budaya petani yang mengembangkan sikap dan perilaku "*nrimo*" terhadap alam seperti yang timbul dalam ungkapan "*mangan ora mangan asal kumpul*", hari ini adalah hari ini sedang hari esok itu soal nanti, merupakan hambatan di dalam pembangunan pertanian. Ungkapan "*mangan ora mangan asal kumpul*" dimanifestasikan dalam bentuk sistem

pertanian yang mengikutsertakan banyak orang dalam pengorganisasian sawaan, dalam panen (*bawon*) yang mengakibatkan sistem pertanian menjadi subsistem, walaupun hal itu merupakan wujud kepedulian. Selain itu, keterbelakangan Pulau Jawa dilihat Clifford Geertz disebabkan karena terjadinya proses involusi pertanian, merupakan akibat dari "nrimo" yang berkembang di masyarakat. Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul *Involusi Pertanian*, mempertanyakan mengapa perbedaan perkembangan yang senjang antara Jepang dan Jawa pada abad 14 keadaan sosial ekonomi mereka setara. Menurut Geertz, kesenjangan perkembangan disebabkan karena adanya involusi pertanian di Jawa, yaitu suatu pertanian yang berkembang ke dalam atau berjalan tempat. Di Jepang, surplus hasil pertanian di investasikan ke sektor perdagangan dan industri; tetapi di Jawa terjadi dipakai untuk memenuhi kebutuhan perkembangan penduduk yang tinggi. Mengapa terjadi seperti itu? Karena di Jawa berkembang budaya *shared property* (pemerataan kemiskinan). Dengan kata lain, *shared property* ini menyebabkan involusi pertanian yang mengakibatkan kesenjangan pertumbuhan antara Jepang dengan Jawa.

3.1 Teori Modernisasi

Untuk mencapai kondisi masyarakat industri, maka ada 3 teori yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun strategi pembangunan: teori modernisasi, pembagian kerja secara internasional, dan ketergantungan. Menurut teori modernisasi kemiskinan suatu negara disebabkan faktor internal atau faktor kultural di suatu negara yang akhirnya mengakibatkan terbatasnya modal, sumberdaya manusia, teknologi.

Adapun ciri-ciri spesifik yang dapat membedakan teori modernisasi dengan yang lain:

1. Teori modernisasi didasarkan atas dikotomi antara tradisional dan modern. Modern merupakan simbol kemajuan, pemikiran rasional, cara kerja efektif. Masyarakat yang modern adalah masyarakat industri. Masyarakat tradisional adalah yang berfikirnya irasional, ca

kerja tidak efisien. Masyarakat yang tradisional adalah yang masyarakat agraris. Manusia yang modern adalah manusia yang senantiasa berpikir secara rasional, yang berpikir dalam kerangka pencapaian tujuan tertentu dengan menggunakan alat-alat tertentu, yang semuanya harus dilakukan dengan penuh perhitungan sehingga tujuan tercapai dengan biaya atau pengorbanan yang seminimal mungkin. Petani-petani yang cara kerjanya tidak efisien seperti bekerja secara penuh waktu, bergantung pada musim, percaya pada mitos-mitos sebagai pengatur siklus hidup petani dan pertanian, adalah petani yang tradisional. Petani yang modern adalah petani yang bekerja tidak tergantung pada musim, siklus hidupnya diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, berusaha memperoleh hasil pertanian dengan mengeluarkan biaya sedikit, tetapi memperoleh hasil yang besar.

2. Teori modernisasi didasarkan pada faktor-faktor non material sebagai penyebab kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, faktor politik, dan sebagainya.
3. Teori modernisasi biasanya bersifat *a-historis*. Hukum-hukumnya dianggap berlaku umum atau universal. Seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke modern yang dianggap seperti garis lurus (*linear*)
4. Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pembangunan harus dicari di negara yang bersangkutan.

Beberapa teori modernisasi

1. Teori Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Meskipun bekerja secara terpisah, Evsey Domar dan Roy Harrod sama-sama menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Apabila tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi rendah, sebaliknya apabila tabungan dan investasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang miskin adalah dengan jalan memperbesar tabungan dan investasi. Untuk mengatasi rendahnya investasi di

negara miskin dilakukan dengan mencari tambahan modal baik di dalam negeri (melalui tabungan) dan dari luar negeri (melalui pinjaman dan utang luar negeri).

2. Max Weber: Etika Protestan

Berbeda dengan teori Harrod-Domar yang tidak mempersepsikan manusia sebagai unsur penentu keberhasilan pembangunan, Max Weber justru menyatakan bahwa manusia adalah penentu keberhasilan pembangunan. Dalam bukunya "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*", Weber menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi yang pesat di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat di bawah sistem kapitalisme disebabkan oleh pengaruh Etika Protestan. Agama Protestan yang dikembangkan Calvin di Eropa mengembangkan anggapan bahwa seseorang sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka. Tak seorang yang bersangkutan tidak mengetahuinya sehingga mereka cemas dan tidak tenang. Cara untuk mengetahui seseorang akan masuk surga atau neraka adalah melalui keberhasilan kerjanya. Seseorang yang berhasil dalam kerjanya di dunia maka akan masuk surga, sebaliknya yang tidak berhasil dalam kerjanya akan masuk neraka.

Kepercayaan ini membuat setiap orang berlomba untuk meraih sukses. Orang bekerja keras untuk mencapai surga bukan untuk tujuan duniawi yaitu mencari kekayaan. Inilah yang disebut *etika protestan*, yaitu bekerja yang keras dan sungguh-sungguh terlepas dari imbalan materi. Kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja keras akan diperoleh sebagai hasil sampingan dari keinginan untuk mencapai surga.

Etika protestan menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa. *Calvinisme* kemudian berkembang ke Amerika Serikat dan sana pun kapitalisme sukses berkembang (dalam Arif Budiman). Studi Weber ini adalah studi yang pertama mengungkap hubungan antara agama dengan pertumbuhan ekonomi. Etika protestan dan perkembangan menjadi nilai kerja keras (*etos kerja*). Kajian ini berkembang selanjutnya berhasil menggali adanya nilai kerja keras pada masyarakat Jepang melalui agama Tokugawa, seperti diuraikan

Robert Bellah dalam bukunya *Tokugawa Religion*. Etos kerja yang dibangun dengan agama Tokugawa ini berhasil membangun kapitalisme di Jepang hingga membuat tingkat pertumbuhan ekonomi di Jepang sangat tinggi.

3. David McClelland: Dorongan berprestasi (*n-Ach*)

David McClelland adalah seorang psikolog sosial. Sebagaimana psikolog pada umumnya, ia melihat bahwa kondisi internal individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu. Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa kemiskinan juga disebabkan kondisi internal individu. David McClelland mengembangkan konsep *n-Ach* (*The need for Achievement*), yaitu kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi tidak sekedar untuk meraih imbalan material yang besar. Seseorang yang memiliki dorongan untuk berprestasi sangat besar, tidak disebabkan karena keinginan untuk memperoleh imbalan atau kekayaan di dalam mengerjakan sesuatu tetapi karena keinginan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik dan memuaskan. Seorang pemahat patung bekerja keras membuat patung bukan karena ingin memperoleh uang dari membuat patung, tetapi karena ingin memperoleh hasil berupa patung yang sempurna. Materi yang diperoleh dari hasil kerja keras tersebut adalah produk sampingan dari kepuasan rohani ketika orang dapat menghasilkan sesuatu.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara akan terjadi kalau masyarakatnya memiliki *n-Ach* yang tinggi. Semangat berprestasi ini dapat dilihat pada karya-karya kesusasteraan, seperti puisi, drama, pidato, kisah epik, dan sebagainya. Berbagai kajian yang dilakukan David McClelland menyimpulkan bahwa *n-Ach* dapat ditularkan atau diwariskan (disosialisasikan) melalui latihan-latihan seperti virus. Tetapi menurutnya, sosialisasi yang paling baik dilakukan pada keluarga.

4. W. W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Dalam bukunya yang terkenal, *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto* yang mula-mula terbit pada tahun 1960, Rostow menjelaskan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah

masyarakat. Teori Rostow terkenal dengan teori pentahapan (*the stage theory*), yang sifatnya linear (garis lurus). Bagi Rostow dan sejawatnya, pembangunan merupakan proses yang bergerak ke garis lurus (*linear*) dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat maju. Rostow membagi proses perkembangan masyarakat dalam tahap, yaitu masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan, jaman konsumsi massal.

a. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, berdasarkan pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, konsepsi masyarakat tradisional tidak sepenuhnya statis. Dalam banyak hal penambahan luas lahan, inovasi teknologi, perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian. Akan tetapi, dinamika sosial yang terjadi biasanya terbatas pada tingkat kemampuan *output* perkepala karena tidak ada penggunaan teknologi modern yang diterapkan secara sistematis. Instabilitas faktor musim (kemarau dan penghujan), hama penyakit, fluktuasi harga, selalu mewarnai dinamika produktivitas masyarakat tradisional (dalam Amir Effendi Siregar, ed.). Keterbatasan masyarakat tradisional dalam produktivitas memaksa mereka untuk memusatkan proporsi sumberdaya pada sektor pertanian. Pentingnya sektor pertanian membawa pengaruh pada struktur sosial yang hierarkhis. Hubungan sosial yang bersifat kekeluargaan dan "klan" berperan penting. Berkembang sistem nilai fatalisme jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek tetap ada upaya untuk memperbaiki kehidupan. Pusat kekuasaan politik pada umumnya di daerah dan berada di tangan pemilik tanah (dalam Amir Effendi Siregar, ed.).

Selain ciri-ciri tersebut di atas, beberapa ciri lain dari masyarakat tradisional adalah ilmu pengetahuan belum dikuasai, manusia percaya pada kekuatan gaib, manusia tunduk kepada alam

produksi sangat terbatas, produksi untuk konsumsi (subsistem) sehingga tidak ada investasi (Arif Budiman, 2000).

b. Prakondisi untuk Lepas Landas

Masyarakat yang berada pada tahap prakondisi untuk lepas landas dapat juga disebut sebagai masyarakat yang berada dalam proses transisi, yaitu suatu periode ketika prasyarat-prasyarat untuk lepas landas berkembang.

Prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk lepas landas adalah:

- 1) Mulai berkembangannya ide pembaharuan melalui ilmu pengetahuan modern yang dipergunakan dalam fungsi-fungsi produksi baru di bidang pertanian dan industri. Melalui invasi-invasi yang dilakukan negara maju ke negara yang masyarakatnya masih tradisional, terjadinya perkembangan yang menarik pada masyarakat tradisional. Berkembang gagasan-gagasan untuk kemajuan ekonomi, peningkatan pendidikan, tumbuhnya wiraswasta-wiraswasta yang baru, dan munculnya lembaga perbankan. Menurut Rostow, ada dua kondisi sosial yang kondusif melahirkan wiraswastawan, yaitu (1) adanya elite baru yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional, untuk mendapatkan prestise dan mencapai kekuasaan melalui cara-cara konvensional yang ada, (2) adanya masyarakat tradisional yang cukup flexibel untuk meningkatkan status dalam masyarakat. Kelompok elite baru ini akan berfungsi sebagai tenaga pendorong pembaharuan.
- 2) Kondisi ini merupakan iklim yang kondusif bagi usaha meningkatkan tabungan
- 3) Tabungan yang ada dipergunakan untuk investasi pada sektor-sektor produktif
- 4) Berkembang negara nasional yang berpusat sebagai upaya untuk mengimbangi kekuasaan tuan-tuan tanah di daerah dan kekuasaan kolonial.

c. Lepas Landas

Periode lepas landas adalah periode ketika rintangan dan hambatan lama untuk pertumbuhan sudah dapat diatasi. Secara umum lepas landas terjadi tidak hanya karena terbentuknya model *overhead* sosial, tetapi juga karena perkembangan teknologi di sektor industri dan pertanian, serta kemunculan kekuasaan politik dari suatu kelompok yang siap menganggap modernisasi ekonomi sebagai bisnis politik tinggi yang serius (dalam Amir Effendi Siregar, ed). Secara umum ciri-ciri periode lepas landas adalah:

- 1) Tabungan dan investasi meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional
- 2) Industri-industri baru mulai berkembang sangat cepat
- 3) Berkembang sektor jasa yang melayani kebutuhan pekerja
- 4) Pertanian tumbuh menjadi usaha pertanian yang sifatnya komersial (tidak subsistem).

Selain faktor ekonomi, Rostow mensyaratkan adanya faktor non ekonomi yang berfungsi sebagai pendukung berkembangnya faktor ekonomi. Munculnya lembaga politik dan sosial yang dapat memanfaatkan dorongan ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas, di samping lembaga-lembaga ini membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan. Negara yang melindungi kepentingan wiraswastawan, iklim politik yang menguntungkan industriawan, adalah faktor non ekonomi yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

d. Menuju Kedewasaan, ciri-cirinya:

- 1) Sekitar 10-20% pendapatan nasional secara tetap diinvestasikan kembali
- 2) Meningkatnya *output* (pendapatan) melebihi pertambahan penduduk

- a. Lembaga perbankan yang efektif
 - b. Tenaga ahli dan terampil seperti tenaga kewirausahaan, tenaga administrator professional, ahli ilmu pengetahuan, teknologi dan sains harus sudah ada
- Munculnya tenaga wirausahaan lembaga sebelum lepas landas. Munculnya kebudayaan tertentu. Dalam masyarakat yang mengalami proses anomie, yang akan menjadi kelompok borjuis dan menantang tata nilai lama. Selain itu, lembaga politik dan sosial tertentu sangat diperlukan untuk berkembangnya lembaga lembaga yang menopang pertumbuhan ekonomi.
6. Alex Inkeles dan David H. Smith: Manusia Modern
- Untuk menuju masyarakat modern, maka tidak hanya dibutuhkan modal dan teknologi, tetapi juga dibutuhkan manusia yang modern
- Ciri-ciri manusia modern menurut mereka adalah:
- a. Terbuka pada pengalaman dan ide baru
 - b. Berorientasi ke masa sekarang dan masa yang akan datang
 - c. Punya kesanggupan untuk merencanakan
 - d. Percaya bahwa manusia dapat menguasai alam

Untuk mengubah manusia tradisional menjadi manusia modern, maka pendidikan, pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media mass berperan penting.

3.2 Teori Pembagian Kerja secara Internasional

Pada dasarnya teori pembagian kerja secara internasional menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Negara-negara yang terletak daerah khatulistiwa yang cocok untuk pertanian, sebaliknya melakukan spesialisasi produksi pertanian. Sebaliknya negara-negara yang tidak su melakukan spesialisasi produksi non pertanian. Pembagian ini akan menguntungkan karena modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan produksi pertanian bagi negara yang tanahnya subur, tidak bany

dibandingkan kalau negara ini mengembangkan produksi non pertanian. Demikian sebaliknya ongkos produksi akan mahal apabila negara yang tidak subur mengembangkan produksi pertanian. Oleh karena keuntungan dari spesialisasi ini, maka untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dibutuhkan adanya perdagangan internasional. Melalui spesialisasi ini maka masing-masing negara akan mendapatkan barang secara murah dibandingkan kalau memproduksi sendiri. Spesialisasi produksi ini mendorong berlimpahnya barang sehingga harga barang akan turun dan mencapai titik terendah. Pada dasarnya teori ini menekankan bahwa pembangunan akan berhasil dilakukan apabila suatu negara meleburkan diri dalam ekonomi dunia. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara tidak mungkin hidup sendiri (*terisolasi*) dari yang lain, sehingga masing-masing negara harus hidup saling tergantung dengan yang lain. Todaro menyatakan bahwa "pembangunan yang didasarkan atas kemandirian diri sendiri melalui isolasi sebagian atau keseluruhan, dianggap sebagai pembangunan yang secara ekonomis kurang baik dibandingkan dengan pembangunan yang mengikutsertakan diri ke dalam perdagangan internasional yang bebas dan tidak terbatas".

Dalam perkembangannya, teori pembagian kerja secara internasional ini tidak mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara yang miskin. Kecenderungan yang terjadi adalah negara yang kaya semakin kaya dan negara yang miskin semakin miskin. Pada dasarnya semakin miskinnya negara yang ada di posisi sebagai penghasil produk pertanian adalah:

1. Terdapat stagnasi produktivitas dalam sektor pertanian yang tidak berorientasi ekspor, sehingga kebutuhan rakyat tidak mencukupi
2. Tidak terjadi perkembangan pada barang konsumsi massal
3. Tidak terjadi pengembangan pada produksi barang konsumsi, produksi barang antara dan alat-alat produksi karena ketergantungan pada negara metropolis
4. Lemahnya kaitan antara produksi barang produksi dengan produksi barang konsumsi massal di bawah kerangka sektor pertanian

5. Kalaupun berkembang industri substitusi *import*, negara periferi masih tergantung pada negara metropolis untuk bahan bakunya
6. Industri substitusi *import* hanya ditujukan untuk memenuhi permintaan lapisan masyarakat berpendapatan tinggi, sehingga tidak berdampak pada perluasan pasar

3.3 Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan mengemukakan penolakan terhadap thesis yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi negeri-negeri miskin terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi dengan negara-negara maju yang akan menimbulkan difusi modal, teknologi, nilai-nilai institusi dan faktor-faktor dinamik lainnya kepada negeri-negeri miskin. Proses pembentukan modal sebagai tujuan untuk mengembangkan ekonomi negara terbelakang tidak dapat dilakukan kalau ketidaksempurnaan kelembagaan masyarakat beserta kepincangan dalam struktur sosial dan proses ketidakadilan dalam hubungan ekonomi dengan pihak luar tidak dihilangkan terlebih dahulu (penjelasan lebih lanjut ada di bab 5).

BAB 4

PARADIGMA PERTUMBUHAN

Pembahasan tentang pembangunan di negara-negara berkembang tidak terlepas dari pengkajian tentang paradigma yang menguasai pemikiran para pelaku pembangunan di negara tersebut. Adakalanya sebuah teori berada pada posisi sebagai paradigma, karena menjadi landasan pemikiran bagi perencanaan pembangunan. Biasanya pada saat suatu paradigma berkuasa, maka teori yang berkembang adalah sejalan dengan paradigma tersebut.

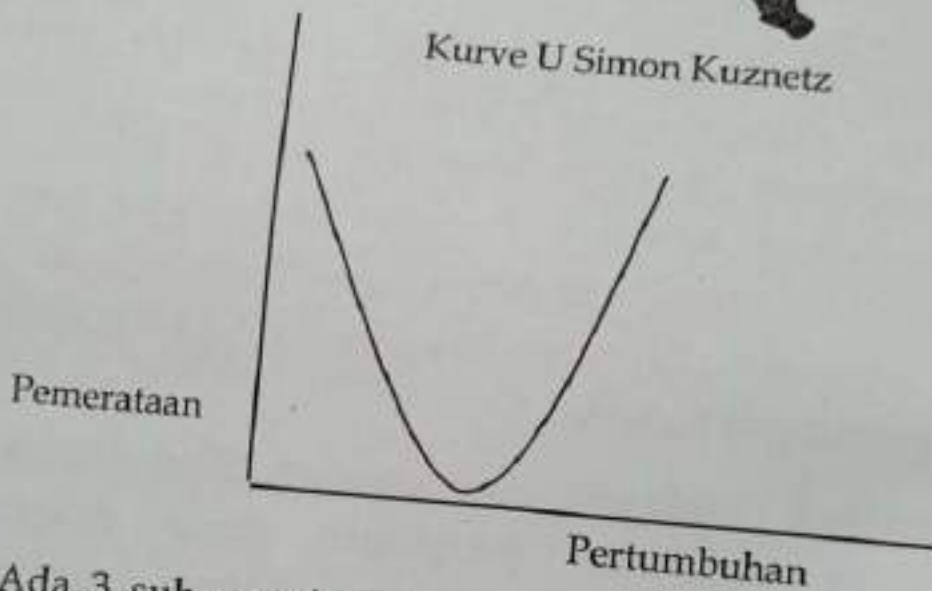
Untuk mengkaji paradigma pembangunan, dapat dilakukan secara *diachronic*. Artinya melakukan pengkajian sesuai dengan urutan munculnya paradigma. Adapun urutan munculnya paradigma pembangunan dapat dibagi dalam beberapa tahapan seperti paradigma pertumbuhan, paradigma kesejahteraan, paradigma strukturalis, paradigma neo ekonomi.

4.1 Paradigma Pertumbuhan

Paradigma ini menguasai pemikiran tentang pembangunan setelah PD II sampai pertengahan tahun 1960-an. Ciri-ciri paradigma ini adalah:

1. Mengidentikkan pembangunan dengan pembangunan ekonomi
2. Tolak ukur pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi

3. Pertumbuhan ekonomi adalah fungsi *saving*, strategi investasi, *capital output* rasio
4. Pemerintah berperan untuk meningkatkan *saving* misalnya dengan cara penarikan pajak, hutang luar negeri, dan mengecilkkan misalnya dengan cara deregulasi dan debirokratisasi, menggiatkan KKN, memperkecil bea dan cukai, dan sebagainya.
5. Ketimpangan adalah kebutuhan, sesuai dengan gambaran S. Kuznets (dalam Todaro, 2003) yang terkenal dengan kurve U, bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan tinggi baru tercapai setelah melalui periode pertumbuhan ekonomi tinggi dengan ketimpangan tinggi.



Ada 3 sub paradigma pertumbuhan yaitu paradigma pentahapan, paradigma pertumbuhan berimbang, dan paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Paradigma pertumbuhan berimbang muncul dengan kritik dan masukan perbaikan terhadap paradigma pentahapan. Paradigma pertumbuhan tidak berimbang muncul dengan kritik dan masukan terhadap paradigma pertumbuhan berimbang.

1. Paradigma Pentahapan

Paradigma ini dikemukakan Rostow (dalam Arief Budiman, 2000) yang juga terkenal dengan teori tahap-tahap (*the stage theory*). Paradigma ini mengilhami model pembangunan yang dilakukan Indonesia yang dilakukan secara bertahap dari pelita ke pembangunan jangka panjang ke pembaruan.

2. Paradigma pertumbuhan Berimbang
 Paradigma pertumbuhan berimbang (*balance growth*) lahir dari pemikiran Rosenstein Rodan dan Ragnar Nurkse (dalam Lestari Sukarniati, 2021). Paradigma ini menentang upaya pembangunan yang bersifat *gradualisme* dan *inkrementalisme*, karena tidak akan dapat membawa suatu bangsa untuk meningkat taraf hidupnya. Dasar pemikiran paradigma ini adalah bahwa kekuatan yang menghambat pembangunan adalah sangat besar sekali sehingga diperlukan dorongan yang sangat besar (*big push*) untuk mengetahui stagnasi ekonomi. Itulah sebabnya paradigma ini disebut juga "teori dorongan besar" (*Big Push Theory*). Rosenstein Rodan menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi yang simultan di berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena keterbelakangan negara-negara dunia III disebabkan oleh banyak faktor yang saling kait mengkait diantaranya antara karena adanya:

- a. *Vicious circle of underdevelopment/poverty* (Nurkse)
- b. *Low level of equilibrium trap* (Leibenstein)
- c. *Circular causation* (sebab musabab yang kait mengkait)

Ragnar Nurkse melihat kegagalan pembangunan di banyak negara disebabkan karena mereka terperangkap dalam lingkaran setan keterbelakangan (*vicious circle of underdevelopment*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawah ini:



Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh lingkaran setan kemiskinan, maka diperlukan investasi secara sinkronis pada beraneka ragam industri yang dapat memperluas pasar.

Gunar Myrdal menyatakan bahwa negara maju berkembang sangat pesat, tetapi negara berkembang mengalami stagnasi. Setiap proses perkembangan di negara maju juga merupakan *circular causation*. Negara-negara maju yang mencapai tingkat kemajuan teknologi ekonomi, produksi industrialisasi juga terperangkap dalam situasi "*path of cumulative development*" (jalur perkembangan kumulatif). Hal itu disebabkan oleh beberapa kekuatan seperti perkembangan:

- Iptek yang terus menerus,
- Pasar yang terus berkembang (*effective demand*),
- Arus kapital ke dalam. Arus kapital cenderung mengalir pada kawasan-kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi,
- Tingginya *income elasticity of demand* terhadap produk-produk manufaktur. Bila terjadi peningkatan pendapatan maka efek terhadap permintaan produk manufaktur tinggi.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang secara kumulatif menyebabkan keterbelakangan di negara-negara berkembang, yaitu:

- Saving*/tabungan per kapita rendah,
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi,
- Pengetahuan dan keterampilan yang rendah,
- Kesehatan rendah yang menyebabkan produktivitas kerja rendah,
- Struktur produksi yang terperangkap ke dalam ekspor komoditi primer, (bahan mentah: batubara, kayu, dan lain-lain) bukan manufaktur, dan
- Kecenderungan import komoditi yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat (misal, industri tenun gendong yang hancur karena industri tenun mesin).

Di sisi lain, pendapatan negara yang rendah tidak memungkinkan adanya investasi di bidang infrastruktur ekonomi, yang mencegah terjadinya pertumbuhan ekonomi. Terbatasnya sumber-sumber infrastruktur pembangunan dan kapital cenderung menciptakan ekonomi dualistis yang berpusat pada *enklave-enklave* tertentu (produk primer saja). Untuk mengatasi hal ini, negara perlu melakukan

- intervensi terencana terhadap bekerjanya mekanisme pasar. Terutama sekali memberikan proteksi terhadap "infant industries" (industri bayi).
3. Paradigma Pertumbuhan Tidak Berkembang (*Unbalanced Growth Paradigma*)

Paradigma ini dikemukakan oleh Albert D. Hirschman (dalam Lestari Sukarniati, 2021). Menurutinya, ide paradigma pertumbuhan berimbang tidak mungkin terrealisir untuk mengatasi masalah kemiskinan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan strategi *big push* akan sangat banyak membutuhkan modal, padahal modal inilah yang menjadi persoalan bagi negara miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Hirschman mengusulkan untuk mengatasi kemiskinan dengan cara membangun beberapa cabang industri yang dipilih secara strategis. Industri-industri yang strategis adalah industri yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Industri yang memiliki keterkaitan ke belakang adalah industri yang menggunakan bahan baku lokal (dari negaradaerah sendiri) sehingga ada keterkaitan yang erat antara produsen awal (petani) dengan industri yang mengolah bahan baku. Kondisi ini akan menciptakan berkembangnya pasar hasil-hasil pertanian dan akan memberikan keuntungan dan keberlanjutan usaha tani. Industri ini juga harus memiliki keterkaitan ke depan, maksudnya adalah memberikan kesempatan terhadap berkembangnya industri-industri yang menggunakan bahan olahan industri tersebut. Misalnya Lampung kaya akan kopi, maka dibangun pabrik kopi. Pabrik kopi ini akan merangsang tumbuhnya pabrik permen yang bahan bakunya kopi bubuk, industri pengemasan kopi, dan sebagainya.

4.2 Paradigma Kesejahteraan

Berbeda dengan paradigma pertumbuhan yang memfokuskan pembangunan dari sisi pertumbuhan ekonomi, paradigma kesejahteraan memfokuskan pembangunan pada kesejahteraan rakyat (dalam Arief Budimar 2000). Ada beberapa sub paradigma dari paradigma kesejahteraan, yaitu

wawasan indikator sosial, pendekatan kebutuhan pokok, dan wawasan redistribusi dengan pertumbuhan.

1. Paradigma Indikator Sosial

Paradigma ini tumbuh setelah mengkritisi paradigma pertumbuhan yang dianggap tidak mampu mengungkap secara nyata kondisi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi secara nasional atau regional, tidak mampu mengungkap secara nyata kondisi kesejahteraan seluruh penduduk di wilayahnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa jadi diperoleh dari pertumbuhan ekonomi sekelompok kecil orang yang menguasai ekonomi dan mampu menutup kemiskinan yang dialami sebagian besar penduduk.

Paradigma ini tidak menolak indikator yang digunakan oleh paradigma pertumbuhan, tetapi mengharapkan agar indikator *economic accounting* dilengkapi dengan *social accounting* sehingga nasib sebagian besar penduduk dapat terungkap/terangkat melalui indikator indikator tersebut. Salah satu indikator sosial yang paling sederhana adalah *Psychal Quality of Live Index* (indeks mutu hidup) yang merupakan indeks gabungan yang terdiri 3 komponen, yaitu: a) angka kematian bayi, b) angka harapan hidup, c) angka melek huruf. Indikator kesejahteraan sosial ini akan berbeda dari negara satu dengan yang lain, dan dari waktu ke waktu.

Untuk memperoleh gambaran tentang kesejahteraan penduduk dapat digunakan Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR), yaitu:

- a. Penduduk, Keluarga Berencana, dan Migrasi
 - b. Pendidikan dan social budaya
 - c. Kesehatan, gizi dan pengeluaran/konsumsi rumah tangga
 - d. Angkatan kerja
 - e. Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Perumahan dan lingkungan hidup

Cara lain untuk mengungkapkan kondisi Kesejahteraan Rakyat dapat juga digunakan indikator lainnya seperti:

Dimensi Kesejahteraan	Indikator
a. Kesehatan + Giz I	
1)	Angka kematian bayi (IMR) = 58/1000 kelahiran
2)	Konsumsi kalori per kapita
3)	Konsumsi protein per kapita
4)	Angka kematian Ibu = 450 per 1000 kelahiran
b. Pendidikan	
1)	Angka buta huruf
2)	Ratio antara anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah dengan jumlah anak usia sekolah
3)	Proposisi anak yang ikut wajib belajar
c. Perumahan dan Sanitasi	
1)	Proposisi rumah yang punya sumber air bersih
2)	Rasio hunian = jumlah kamar dengan jumlah penghuni
3)	Indeks kualitas rumah: lantai tegel/tanah, dinding tembok/gedek, atap genteng/seng/rumbia.

2. Paradigma Kebutuhan Pokok (*Basic Need*)

Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Need Approach/BNA*) atau Strategi Kebutuhan Pokok (*Basic Need Strategy/BNS*), muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan paradigma pertumbuhan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti *indicator social*, *Basic Need* juga termasuk paradigma *welfare* (kesejahteraan). Embrio pemikiran tentang *Basic Need* sebenarnya sudah ada dalam pemikiran DR. Mohammad Hatta dan Gunar Myrdal. Pidato Moh Hatta tahun 1959 pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menegaskan perlunya pemenuhan kebutuhan pokok untuk mewujudkan keadilan sosial. Myrdal berpendapat bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Pandangan tersebut dilanjutkan oleh Yayasan *Barrilocke Foundation* yang juga menekankan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Baru kemudian tahun 1976 dalam "*ILO World Employment Conference*" di Jenewa, *Basic Need* menjadi tema pembicaraan utama dan salah satu *keynote address*

dilakukan oleh Richard Jolly yang menobatkan *Basic Need (the Enthronement of BN)*.

Konferensi tersebut menghasilkan kesimpulan:

- a. Konsep Kebutuhan Pokok mencakup dua hal, yaitu
- b. Konsumsi minimum untuk keluarga seperti sandang, papan, pendidikan, kesehatan
- c. Pelayanan negara (*public service*) seperti listrik, sumber air bersih, transportasi, perumahan, kesehatan, dan sebagainya.
- d. Konsep Kebutuhan Pokok merupakan konsep yang *country specific*, artinya adalah ukurannya berbeda antara negara yang satu dengan yang lain
- e. Konsep yang dinamis, artinya berbeda antara kurun waktu yang satu dengan yang lain
- f. Tidak boleh diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan secara subsisten
- g. Perlu didorong partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Moeljarto)

Menurut ILO, agar kebutuhan pokok dapat terpenuhi maka perlu dikatakan 3 hal:

- a. Membuka lapangan kerja
 - b. Meningkatkan pertumbuhan
 - c. Memenuhi kebutuhan pokok
3. Paradigma Redistribusi dengan pertumbuhan
- Paradigma Redistribusi dengan pertumbuhan (*Redistribution with Growth*) dipelopori oleh Hollis Chenery. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa paradigma pertumbuhan ekonomi, walaupun memiliki dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya yaitu menimbulkan ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada beberapa negara maju dan golongan lapisan atas, sebaliknya mengakibatkan marginalisasi negara-negara berkembang dan golongan miskin dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan redistribusi hasil pembangunan. Ia menyarankan agar negara-negara kaya mentransfer 2% dari GNP nya per tahun ke negara-negara miskin. Pendapat ini memperoleh banyak kritikan, seperti:

- a. Sulit dilaksanakan di dalam praktiknya. Komisi Willy Brandt yang dibentuk PBB menyarankan agar negara maju mentransfer 1% dari pendapatan nasionalnya, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Apalagi kalau 2%.
- b. Hasil simulasi saran Chenery menunjukkan bahwa transfer 2% pendapatan nasional negara maju ke negara miskin selama 25 tahun hanya meningkatkan tingkat konsumsi negara-negara miskin hanya US \$1 per tahun.

4.3 Paradigma Neo Ekonomi

Kritik yang diberikan paradigma Neo Ekonomi terhadap paradigma pertumbuhan adalah: tidak peduli terhadap *who gets, how much, of what* dari hasil penyembuhan ekonomi. Salah seorang tokoh Paradigma Neo Ekonomi, yaitu Dudley Seers (dalam Kodrat Wibowo, 2012) menyatakan bahwa pengalaman pembangunan tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa meskipun banyak negara-negara berkembang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun, sebagaimana ditargetkan PBB, akan tetapi nasib sebagian terbesar rakyat miskin tidak mengalami perbaikan.

Paradigma ini menentang kecenderungan *demonstration effect*, yaitu kecenderungan untuk meniru *development style* dari negara-negara maju karena selama menggunakan tolak ukur keberhasilan ekonomi yang digunakan negara maju, peningkatan negara-negara terbelakang akan selalu di bawah dan akan menimbulkan *inferiority complex*. Upaya untuk mengejar negara maju merupakan upaya semu.

Keadaan penduduk	Kota	Desa
Paling miskin	200 kg	180 kg
Miskin sekali	360 kg	240 kg
Miskin	480 kg	320 kg

Ukuran kemiskinan Biro Pusat Statistik (BPS)

Ukuran kemiskinan didasarkan atas konsumsi komoditi yaitu sekurang-kurangnya 14 komoditi untuk kota. Sedangkan, ukuran terakhir mencakup 14 komoditi yang tidak membedakan kota dan desa. Sedangkan data yang digunakan untuk mengukur berapa penduduk yang berada di garis kemiskinan adalah data dari SUSENAS. Ukuran dilakukan atas kerjasama World Bank yang menyamakan garis kesejahteraan dengan garis kemiskinan.

Wilayah	konsumsi pangan	konsumsi nonpangan	jumlah
Kota	23.303	4.602	27.905
Desa	15.576	2.668	18.224

*) Rupiah per kapita per bulan

Konsumsi pangan meliputi: karbohidrat, protein, rokok

Untuk mengukur kemiskinan juga dapat menggunakan pembagian tipe keluarga:

1. Pra-sejahtera= tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dan nonpangan

2. Sejahtera-1

3. Sejahtera-2

4. Sejahtera+

Kemiskinan merupakan suatu gejala multidimensional; karena kemiskinan bisa diartikan dalam dimensi: 1) *welfare* (ketidakcukupan kebutuhan pangan); 2) sosial, di mana kemiskinan disebabkan karena *vulnerability* (rentan) atau amat sensitif terhadap perubahan/gejolak yang terjadi. Misal petani masih rentan terhadap inflasi harga pupuk, kemarau panjang, karena bila panen gagal ia akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. 3) kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang merupakan produk dari struktur sosial/ekonomi yang ada, atau kesenjangan dalam kepemilikan faktor produksi. Misal ketunakaryaan, tuna wisma. 4) kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan sebagai produk dari kultur masyarakat tertentu (pasrah fatalistik, harapan terhadap ratu adil). Pendapat ini masih jadi pertentangan karena dianggap penyebab kultur itu adalah karena struktur yang ada. Baca Oscar Lewis "The Childarien of Saucher". 5) kemiskinan

dalam arti politis, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena ketakberdayaan menghadapi kekuasaan (*powerlessness*), kekumuhan, kematian dini, dan lain-lain.

Proyek-proyek pengentasan kemiskinan selama ini (seperti IDT, dan lain-lain) biasanya melihat kemiskinan sebagai suatu "*amorphous*" (tanpa bentuk, bersifat tunggal). Seharusnya yang dikaji apa penyebabnya? Bagaimana sosok kemiskinan itu? Dan seharusnya pemecahannya diserahkan kepada daerah dan masyarakat setempat, karena setiap daerah memiliki karakteristik, penyebab, dan profil kemiskinan yang berbeda.

Kedua, seberapa jauh pembangunan dapat menurunkan ketimpangan? Ada beberapa ukuran yang dipakai untuk mengukur ketimpangan:

1. Ratio antara pendapatan dari 20% penduduk teratas/terkaya dengan 20% termiskin
2. Berapa persen dari pendapatan nasional yang jatuh pada 40% penduduk termiskin.

Kalau penduduk miskin menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional, maka negara tersebut sangat timpang. Kalau mereka menerima 12-17%, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang timpang. Kalau mereka menerima > 17% negara dikategorikan pemerataannya cukup.

Gini Ratio-Gini Index (*Simon Kutznety*). Gini adalah pakar ekonomi dari Itali. Untuk mengetahui GR harus terlebih dahulu mempelajari Kurve Lorenz, yaitu kurve yang menunjukkan berapa persen pendapatan nasional yang jatuh pada berapa % dari penduduk. Kalau kurve Lorenz merupakan garis diagonal maka suatu negara mempunyai pembagian pendapatan yang amat merata, tetapi kalau kurve Lorenznya melengkung (garis diagonalnya) maka terjadi ketimpangan. Kalau lengkung garis diagonalnya semakin jauh dari *line of perfect equality*, maka semakin timpang pembagian pendapatan suatu negara. Suatu negara dalam keadaan merata sempurna bila LPE akan berimpit dengan kurve Lorenz sehingga tidak ada lagi ruang tersisa. Sedangkan, ketimpangan sempurna

terjadi bila kurve Lorenz berimpit dengan segitiga ABC. Suatu negara dipandang mempunyai tingkat pemerataan yang baik kalau GR-nya rendah. Makin kecil makin merata, makin besar makin timpang. Indonesia segi pendapatan, termasuk timpang karena $GR=0,4$ tetapi dari pengeluaran termasuk merata.

Ketiga, sejauhmana pembangunan dapat mengurangi pengangguran

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dengan mencari pekerja (BPS, *World Statistic*). Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Ide ini lahir dari Dudley Seers yang ditopang oleh Mahbub Ulhaq, Baca Mahbub Ulhaq "Tirai Kemiskinan", Sritua Arief & Adi Sasono "Keterbelakangan dan ketergantungan", Mulyarto Tjokrowinoto "Politik Pembangunan". Masalah menyatakan bahwa masalah pembangunan bukan hanya berapa yang diproduksi tetapi apa yang dihasilkan, dan bagaimana hal itu didistribusikan. Negara-negara miskin seringkali mempunyai distribusi yang jelek karena institusi-institusi yang melaksanakan pembangunan biasanya tak netral, akan tetapi cenderung mengacu kepada kepentingan golongan atas. Di dalam pemilihan antara 2 kutub barang produksi, yaitu antara memproduksi barang mewah atau barang pokok ada kecenderungan besar negara-negara tadi memproduksi barang-barang mewah.

Kalau semua sumber di suatu negara dipakai untuk produksi, maka ada 2 kutub pilihan barang yaitu antara memproduksi kebutuhan pokok atau barang mewah. Negara-negara miskin (*lost developing countries*) yang terjadi seringkali lebih memilih memproduksi barang-barang mewah. Mengapa? Karena protes alokasi sumber tak ditentukan oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi ditentukan oleh *effective demand* atau permintaan yang didukung oleh daya beli. Misal, alokasi sumber lebih mengarah ke produksi parabola, telepon genggam daripada produksi sabun cuci, dan lain-lain.

terjadi bila kurve Lorenz berimpit dengan segitiga ABC. Suatu negara dipandang mempunyai tingkat pemerataan yang baik kalau GR-nya rendah. Makin kecil makin merata, makin besar makin timpang. Indonesia segi pendapatan, termasuk timpang karena $GR=0,4$ tetapi dari pengeluaran termasuk merata.

Ketiga, sejauhmana pembangunan dapat mengurangi pengangguran

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dengan mencari pekerja (BPS, *World Statistic*). Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Ide ini lahir dari Dudley Seers yang ditopang oleh Mahbub Ulhaq, Baca Mahbub Ulhaq "Tirai Kemiskinan", Sritua Arief & Adi Sasono "Keterbelakangan dan ketergantungan", Mulyarto Tjokrowinoto "Politik Pembangunan". Masalah menyatakan bahwa masalah pembangunan bukan hanya berapa yang diproduksi tetapi apa yang dihasilkan, dan bagaimana hal itu didistribusikan. Negara-negara miskin seringkali mempunyai distribusi yang jelek karena institusi-institusi yang melaksanakan pembangunan biasanya tak netral, akan tetapi cenderung mengacu kepada kepentingan golongan atas. Di dalam pemilihan antara 2 kutub barang produksi, yaitu antara memproduksi barang mewah atau barang pokok ada kecenderungan besar negara-negara tadi memproduksi barang-barang mewah.

Kalau semua sumber di suatu negara dipakai untuk produksi, maka ada 2 kutub pilihan barang yaitu antara memproduksi kebutuhan pokok atau barang mewah. Negara-negara miskin (*lost developing countries*) yang terjadi seringkali lebih memilih memproduksi barang-barang mewah. Mengapa? Karena protes alokasi sumber tak ditentukan oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi ditentukan oleh *effective demand* atau permintaan yang didukung oleh daya beli. Misal, alokasi sumber lebih mengarah ke produksi parabola, telepon genggam daripada produksi sabun cuci, dan lain-lain.

BAB 5

INTERNATIONAL STRUKTURALIST

Pada tahun 1965 hampir 100 ekonom Amerika Latin berkumpul di Mexico City melakukan suatu diskusi besar yang membicarakan persoalan mengapa negara-negara Amerika Latin miskin, apakah karena negara tersebut ditakdirkan miskin atau karena ada mekanisme yang menyebabkan negara tersebut menjadi miskin? Dari diskusi ini lahirlah "Deklarasi Ekonom Amerika Latin" yang inti isi deklarasi tersebut adalah: mencari teori yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab kemiskinan negara-negara Amerika Latin, dan diperoleh formulasinya bahwa penyebab keterbelakangan karena rintangan yang struktural sifatnya.

Pada tingkat internasional timbul dimensi pemikiran baru yang progresif yang dipelopori eksponen dunia ketiga. Pada tahun 1974 UNTAD mencetuskan Tata Ekonomi Internasional Baru yang menghendaki pembaharuan tata hubungan baru antara negara sedang berkembang di bumi Selatan dan Utara, serta menganjurkan agar negara sedang berkembang memperbaiki tata hubungan sosial, politik dan ekonomi ke arah prinsip swadaya, partisipasi masyarakat dan keadilan sosial dengan lebih memperhatikan lapisan masyarakat miskin. Dengan kondisi ini, lahirlah pemikiran kritis yang menganalisis kemiskinan negara dunia ketiga. *International structuralist* merupakan pendekatan yang menganalisa negara-negara terbelakang di Dunia Ketiga, karena ketidak-tepatan pendekatan

"linear stages" ala Rostow yang mengemukakan bahwa proses pembangunan ekonomi yang akan dapat dilakukan apabila melakukan proses pembentukan modal atau kapital secara terus-menerus.

Salah satu tesis dalam pendekatan strukturalis adalah ketergantungan (*dependency thesis*) yang lahir dari gagasan-gagasan sarjana Amerika Latin. Para pencetus thesis ketergantungan ini antara lain Andre Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso, Theotonio Dos Santos, dan pemikir yang dari luar Amerika adalah Samir Amin. Para pencetus teori ternyata berlandaskan kerangka pemikiran Paul Baran. Inti pemikiran Baran adalah bahwa faktor utama penyebab keterbelakangan negara-negara Amerika Latin yang begitu kaya bahan mentah adalah proses eksploitasi oleh pihak asing sebagai akibat hubungan ekonomi dengan pihak asing yang sifatnya tidak adil. Thesis ketergantungan mengemukakan penolakan terhadap thesis yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi negeri-negeri miskin terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi dengan negara-negara maju yang akan menimbulkan difusi modal, teknologi, nilai-nilai institusi dan faktor-faktor dinamik lainnya kepada negeri-negeri miskin.

Dalam perkembangannya thesis ketergantungan mendapat kritikan yang justru memperkuat thesis ketergantungan. Para pengkritik tersebut adalah Richard Fagen, Ivan Oxaal, Christian Palloix dan Ranjit Sao. Para pengkritik mengemukakan bahwa proses eksploitasi yang dilakukan pihak asing terhadap massa rakyat di negara-negara terbelakang telah dilakukan atas bantuan kekuatan dalam negeri dan kelas-kelas yang telah membantu proses eksploitasi ini sebagai "*kelas komprador*" adalah justru kelas-kelas yang langsung melakukan penindasan di dalam negeri. Dengan memasukkan unsur kelas di dalam negara terbelakang maka thesis ini disebut ketergantungan dan keterbelakangan (*dependency and underdevelopment thesis*). Thesis ini mengemukakan bahwa proses pembentukan modal sebagai tujuan untuk mengembangkan ekonomi negara terbelakang tidak dapat dilakukan kalau ketidaksempurnaan kelembagaan masyarakat beserta kepincangan dalam struktur sosial dan proses

ketidakadilan dalam hubungan ekonomi dengan pihak luar tidak dihilangkan terlebih dahulu.

Pemikiran Paul Baran

Paul Baran (dalam Arif Budiman, 2000) adalah pencetus model dasar bagi tesis alternatif mengenai keterbelakangan ekonomi dan sosial negara-negara dunia ketiga. Menurutnya, keterbelakangan tersebut disebabkan interaksi ekonomi internasional di mana faktor modal bergerak dari negeri di mana produktivitas batas (*marginal productivity*) faktor modal ini rendah ke negeri di mana produktivitas batasnya tinggi untuk menuju kesinambungan keseluruhannya tidak terjadi. Pergerakan faktor modal dari negeri maju ke negeri miskin terjadi dengan tujuan menyedot keuntungan dari negeri miskin. Keuntungan yang disedot ini ternyata adalah bagian pendapatan terbesar dari penambahan pendapatan yang diakibatkan adanya investasi asing sebagai akibat pergerakan faktor modal.

Jadi naiknya pendapatan nasional sebagai akibat adanya investasi tidak dinikmati sebagian besar rakyat di negeri tersebut, tetapi hanya sedikit anggota masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari proses eksploitasi. Selain tidak menyejahterakan masyarakat, masuknya investasi menggeser kebiasaan sosial seperti mengganti hubungan paternalistik (feodal dan semi feodal), orientasi ekonomi dari subsistem ke produksi untuk pasaran luar negeri sehingga ekonomi rakyat menjadi terpengaruh ekonomi kapitalis luar negeri. Penerapan nilai-nilai komersial dalam tata hubungan sosial masyarakat yang feodal atau semi feodal justru memperhebat eksploitasi kepada golongan miskin. Proses eksploitasi dalam sistem kapitalis ini diiringi dengan korupsi dan ketidakadilan dalam setiap tingkat struktur pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan pemilik modal dari sistem kapitalis internasional.

Akibatnya terjadinya kesenjangan sosial, maka muncul reaksi dari sekelompok kalangan kelas menengah yang sebagian terpelajar dan pengusaha nasional. Kedua golongan tersebut melihat dominasi asing sebagai suatu yang perlu disingkirkan, tetapi pada akhirnya kedua

golongan ini tidak mampu melakukan perubahan. Penyebab kemampuan tersebut:

1. Kedua golongan relatif lemah karena tidak memiliki kemampuan ekonomi dan kepercayaan pada diri sendiri. Mereka tetap bertahan dengan nilai-nilai politik, moral, dan kebudayaan pihak yang berkuasa dalam sistem feodal.
2. Oleh karenanya mereka tidak menerima ajakan untuk revolusi sosial dan tidak menyatukan dirinya dalam barisan golongan bawah.
3. Karena ketidakmampuannya maka mereka akhirnya melampiaskan kerjasamanya dengan pemilik modal asing dan penguasa lokal (golongan feodal).
4. Sebagian golongan terpelajar menjadi pegawai perusahaan asing, mereka senang menjadi pihak yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat.
5. Pihak pengusaha nasional menjadi *partner* asing yang akhirnya memperkuat aliansi golongan kapitalis asing dengan pribumi.

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan di atas landasan struktur sosial yang kapitalis dan feodalis, dilakukan dengan mengutamakan sektor industri dan ekstraktif, karena produksi pertanian tidak dapat diharapkan sebagai akibat padatnya penduduk di sektor ini. Sektor industri tumbuh secara sehat, karena hanya memproduksi barang untuk kebutuhan elite karena lebih menguntungkan. Selain itu, banyak industri yang akhirnya mematikan industri rakyat yang selama ini memproduksi barang sejenis. Mereka tumbuh menjadi industri yang monopolistis atau *oligopolistic* yang dikuasai sekelompok kecil orang. Keuntungannya diinvestasikan normal, selain dikirim ke luar negeri dan sebagian tidak diinvestasikan di bidang yang mendukung perekonomian rakyat. Investasi dari keuntungan biasanya untuk konsumsi mewah seperti rumah mewah, peminjaman uang berbunga tinggi, menumpuk kekayaan di luar negeri, dan sebagainya. Sektor ekonomi menjadi tidak berkembang dan subsistem.

Sektor ekstraktif didominasi pihak asing, karena pengusaha pribumi tidak punya modal. Sektor ini tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja (sangat kecil). Pihak asing menjadi mudah bergerak di dalam negeri.

karena golongan komprador melindungi pihak asing. Sifat kerjasama antara keduanya saling menguntungkan dalam upaya mempertahankan status quo. Oleh karena itu tidak akan mungkin keluar kebijakan yang populis. Oleh karena itu, aliansi antara golongan tuan tanah, golongan industrialis yang dekat dengan penguasa, dan golongan kapitalis yang berkompromistis harus dihancurkan.

5.1 Thesis Ketergantungan dan Keterbelakangan

5.1.1 Andre Gunder Frank

Untuk menjelaskan mekanisme menterbelakangan negara-negara miskin, Frank membuat pembagian yaitu negara-negara metropolis maju (*develop metropolitan countries*) dan negara-negara satelit yang terbelakang (*satellite underdeveloped countries*). Frank (1984) menolak argumentasi yang menyatakan bahwa negara miskin akan keluar dari kemiskinannya kalau terjadi difusi modal, teknologi, nilai-nilai industri dari negara kaya ke negeri miskin. Melalui penemuan-penemuan historis di Amerika, Frank menyatakan bahwa perkembangan sehat dan otonom justru terjadi pada waktu hubungan metropolis dan satelit tidak ada.

Frank menolak thesis "*dual society*" dan "*dual economic*" yang dikembangkan Arthur Lewis. Thesis *dual society* mengatakan bahwa di dalam negara miskin ada dua sektor yang terpisah yaitu sektor modern dan tradisional, dan kedua sektor mengalami perjalanan sejarah yang berbeda-beda dan tidak ada sangkut paut antara keduanya. Dalam hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara miskin, ternyata hanya sektor modern yang mendapatkan efek sehingga menjadi lebih modern dan berkembang sedang sektor tradisional tetap terbelakang, subsistem, feodalistis dan berada dalam kondisi *precapitalist* (tidak mengenal *money economy*).

Sektor modern menjadi *fronting agent* dari sistem kapitalis dunia yang melakukan eksploitasi terhadap daerah-daerah dan sektor-sektor yang ekarang menjadi terbelakang. Metropolis di negeri miskin menjalankan peranan sebagai alat untuk mengeruk surplus ekonomi (*economic surplus*)

negeri miskin untuk dilempar ke luar negeri. Oleh karena itu tidak akan terjadi proses perkembangan mandiri (*self generating dan self perpetuating*).

Ada 4 hipotesa pokok Andre Gunder Frank:

1. Dalam struktur hubungan metropolis dan satelit seperti yang disebutkan di atas, pihak metropolis akan berkembang pesat sedangkan pihak satelit akan menuju kepada keterbelakangan yang langgeng. Walaupun ada perkembangan yang terlihat di permukaan oleh sebagian kecil masyarakat bersifat tidak permanen akan tetapi ketergantungan pihak luar.
2. Negeri-negeri miskin yang sekarang menjadi satelit, dapat mengalami perkembangan ekonomi yang sehat apabila kaitannya dengan metropolis dunia tidak ada atau sangat lemah.
3. Kawasan-kawasan yang saat ini terbelakang adalah kawasan yang pada masa lampau mempunyai kaitan dengan metropolis dari sistem kapitalis internasional. Kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan ekspor bahan mentah primer.
4. Pertumbuhan Latifunda sehingga menjadi kawasan perkebunan dan *hacienda* yang maju bukanlah didasari oleh proses penerapan sistem kapitalis asing dan sistem feodal. Kawasan Latifunda yang maju memang sudah mengalami pertumbuhan yang kokoh berdasarkan dinamikanya sendiri dalam memberikan respon terhadap kesempatan-kesempatan yang timbul.

5.1.2 Dos Santos

Dos Santos memperluas argumentasi Frank dengan melihat pola tingkah laku elite penguasa yang sebetulnya bertanggungjawab bagi timbulnya proses eksploitasi yang luas dan dalam strata bawah. Menurut Dos Santos titik berat ketergantungan tidaklah semestinya merupakan "faktor luar" tetapi harus juga melihat faktor dalam negeri miskin. Ketergantungan dan efek-efek yang diakibatkan dalam tata hubungan ekonomi di dalam negeri tidak dapat dinetralisasi hanya dengan melakukan pendekatan isolasi seperti terkandung dalam pemikiran Frank.

Ada 3 jenis ketergantungan (menurut Dos Santos, dalam Jamaludin, 2016):

1. Ketergantungan kolonial (*Colonial Dependence*), di mana kolonial atau penjajah mendominasi hubungan ekonomi dengan negeri jajahannya.
2. Ketergantungan Industri Keuangan (*Industrial Financial Dependence*), di mana terjadi dominasi modal besar (penghujung abad 19) oleh negeri penjajah dengan melakukan investasi di negeri jajahan dalam produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi negeri penjajah. Struktur produksi negeri jajahan tumbuh melayani ekspor komoditi bahan mentah primer sehingga terjadi apa yang disebut oleh orang-orang Amerika Latin "*desarrollo hacia afuera*" (perkembangan yang berorientasi ke luar negeri).
3. Ketergantungan teknologi Industri (*Technological Industrial Dependency*), sebagai akibat operasi perusahaan asing untuk memenuhi pasaran negara terbelakang.

5.1.3 Samir Amin

Salah satu dasar bertolak Samir Amin dalam menerangkan pemikirannya mengenai ketergantungan dan keterbelakangan negara-negara yang terbelakang adalah konsep pertukaran yang tidak adil (*unequal exchange*) yang dikembangkan oleh Arghiri Emmanuel. Konsep pertukaran yang tidak adil ini menunjukkan bagaimana terjadinya pengalihan surplus dari negara-negara miskin (yang disebutnya "*periphery*" = Negara-negara pinggiran) kenegara-negara maju yang disebutnya "*centre*" = negara-negara sentral sebagai akibat proses perdagangan internasional di antara kedua kelompok negara ini.

Konsep pertukaran yang tidak adil yang dikembangkan oleh Arghiri Emmanuel dapat diterangkan sebagai berikut: (dalam Kasnawi dan Ramli, 2015)

- q = modal tetap (*constant capital*)
- v = modal berubah (*variable capital*)
- u = nilai lebih (*surplus value*)
- N = nilai barang
- e = tingkat eksploitasi

m = komposisi organik modal (*organic composition of capital*)
 r = tingkat keuntungan (*rate of profit*)
 p = harga barang

Berdasarkan konsep nilai lebih, nilai barang dinyatakan sebagai berikut:
 $N = q(4v + u) + 1$ q merupakan nilai bahan-bahan mentah dan mesin yang digunakan dalam proses produksi, v merupakan nilai yang dibayarkan (pengertian Immanuel bahwa tingkat upah yang tinggi di negara-negara terbelakang dalam proses perdagangan internasional adalah penyebab utama bagi terjadinya pengalihan surplus besar-besaran dari negara-negara terbelakang ini ke negara-negara maju. Untuk baiklah dikemukakan dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama ialah mengenai proses perdagangan internasional dalam bentuk primer.

Ilustrasi yang kedua ialah ilustrasi mengenai perdagangan internasional sesudah terjadi penurunan tingkat upah di negara terbelakang. Angka yang dikemukakan adalah hanya merupakan misalan-misalan saja.

Ilustrasi 1

Komoditi	q	v	u	N	e	m	F	P
A	1000	1000	500	1000	500	1000	2000	3000
B	1 1/2						1 2/3	43%
	43%	2860						2140

Ilustrasi 2

Komoditi	q	v	u	N	e	m	?	P
A	1000	500	500	2000	1	2/3	66,66%	2500
B	1000	500	1500	3000	3	2/3	66,66%	2500

Dalam ilustrasi yang pertama, pertukaran yang tidak adil terjadi disebabkan adanya perbedaan dalam komposisi organik modal. Dalam contoh ini, kedua komoditi berdasarkan tingkat harganya akan dipertukarkan dengan perbandingan 2,86 : 2,14 dan nilai masing-masing menimbulkan perbandingan 3 : 2. Jelas di sini terselubung suatu pengalihan nilai dari negara yang memproduksi komoditi B ke negara yang memproduksi komoditi A.

Dalam ilustrasi kedua, tingkat upah di negara yang memproduksi komoditi B turun sebesar 50%. Di sini kita lihat, tingkat eksploitasi meningkat sedangkan komposisi organik modal menjadi sama di tiap negara. Harga barang-barang akan berbanding sebagai 1 : 1 sedangkan nilai barang-barang berbanding sebagai 3 : 2. Di sini kita lihat kembali bahwa negara yang memproduksi komoditi B rugi dalam bentuk adanya pengalihan nilai. Tetapi pada waktu ini, ketidakadilan dalam proses pertukaran bukan disebabkan oleh adanya perbedaan dalam komposisi organik modal tetapi disebabkan oleh adanya tingkat upah yang lebih rendah di negara yang memproduksi komoditi B.

Jika bersamaan dengan ini terjadi pula komposisi organik modal yang bertambah rendah di negara yang memproduksi komoditi B, maka tingkat ketidakadilan yang menimpa negara ini menjadi lebih tinggi.

Samir Amin (dalam Agus Soeyono, 2010) berpendapat bahwa oleh adanya rintangan-rintangan yang ditimbulkan antara lain oleh proses pertukaran yang tidak adil di antara negara-negara terbelakang dengan negara-negara maju seperti yang diterangkan di atas dengan segala akibatnya, maka proses transisi dari situasi ekonomi prakapitalis ke situasi ekonomi kapitalis di negara-negara yang terbelakang ini mengambil bentuk yang sangat berlainan dari yang pernah dialami oleh negara-negara maju pada waktu negara-negara ini mengalami proses transisi, sehingga negara-negara terbelakang ini tetap terus terbelakang. Dalam hubungan ini, Samir Amin mengemukakan Sembilan thesis utama yang dapat diterangkan secara satu persatu sebagai berikut.

Thesis 1: Ketidakadilan dalam perdagangan internasional dan proses investasi modal asing di negara-negara terbelakang yang kemudian mengikutinya telah menimbulkan keterbelakangan ekonomi rakyat di negara-negara di dalam bentuk hancurnya kerajinan rakyat dan industri-industri kecil lainnya. Kemunduran ini tidak dapat diperbaiki dengan berdirinya industri-industri baru di negara-negara terbelakang ini akibat masuknya modal asing oleh karena industri-industri baru ini sangat berorientasi keluar mancanegara di negara induknya membuat negara-negara yang sedang berkembang di mana proses produksi barang-barang

industri ini dilakukan dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan mancanegara yang tak lebih merupakan negara-negara satelit pada saja. Dalam hal ini Samir Amin mengemukakan contoh-contoh yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong.

Pertambahan penduduk di sektor agraris tradisional dan kerajinan rakyat dan industri-industri kecil ini banyak berada dipertentangan dengan tidak terserapnya buruh dari sektor tradisional ini ke jumlah yang berarti dalam industri-industri baru, telah menimbulkan yang disebut "krisis agraris" (*agrarian erisis*) di negara-negara terbelakang di mana produktivitas batas buruh menjadi sangat rendah atau dengan nol akibat adanya pengangguran terselubung di samping pengangguran terbuka di sektor tradisional ini. Dalam mendiskusikan tesisnya ini, Samir Amin mengambil contoh India dan Mesir membandingkannya dengan situasi di Eropa di mana dalam proses transformasi seperti ini, ekonomi Eropa menimbulkan suatu keseimbangan baru antara kerajinan rakyat dan industri-industri kecil lainnya yang menjaga keberlangsungannya dan menjamin penyediaan tenaga kerja bagi buruh-buruh di sektor ini. Di India dan Mesir masuknya modal asing telah menimbulkan apa yang disebut "*regressive equilibrium*" yang telah melampirkan sebagian besar buruh tercampak keluar dari sistem produksi.

Thesis 2: Proses spesialisasi internasional yang tidak mengakibatkan negara-negara terbelakang tidak bisa melepaskan diri dari suatu/susunan ekonomi yang mengandung distorsi yaitu sangat ketergantungan orientasi keluar negeri. Meskipun ada pengembangan industri-industri pengganti impor dan timbulnya spesialisasi baru sebagai akibat operasi perusahaan-perusahaan mancanegara di negara-negara terbelakang namun negara terbelakang ini pada hakikatnya berada di atas landasan yang sama seperti yang sudah dan masih dialaminya sebagai produsen dan pengeksport bahan-bahan mentah primer. Mengeksport bahan-bahan mentah primer dalam keadaan ketergantungan dan mengeksport barang-barang mentah primer dalam keadaan ketergantungan dan mengeksport barang-barang industri pun juga dalam keadaan ketergantungan dan mengeksport tidak merubah kondisi esensial negara-negara terbelakang.

Ketergantungan industri-industri substitusi impor akan bahan-bahan mentah, bahan-bahan penolong dan mesin-mesin dari luar negeri bisa menimbulkan pertukaran yang tidak adil seperti yang dialami pada waktu negara-negara terbelakang berada dalam perdagangan bahan-bahan mentah primer. Ekspor barang-barang industri yang mulai dilakukan oleh beberapa negara yang sedang berkembang di mana ekspor ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan mancanegara tidaklah dapat dianggap sebagai suatu prestasi ekonomi yang kokoh.

Thesis 3: Distorsi yang disebutkan dalam thesis ke dua di atas menimbulkan peningkatan yang menyolok dalam jumlah orang yang bekerja di sektor jasa yang bukan merupakan hasil evolusi dari struktur permintaan efektif di dalam negeri maupun hasil evolusi dari kenaikan produktivitas. Timbulnya peningkatan yang menyolok dalam jumlah orang yang bekerja di sektor jasa di negara-negara terbelakang, adalah diakibatkan oleh tidak cukupnya dan tidak kokohnya industrialisasi, sehingga tenaga kerja yang ada banyak melakukan kegiatan-kegiatan jasa dan kegiatan-kegiatan administratif yang pada hakikatnya bukanlah kegiatan-kegiatan produktif yang utama.

Di negara-negara terbelakang persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor jasa (perdagangan, administrasi, jasa-jasa dan lain-lain) jauh lebih besar dari yang bekerja di sektor industri yang berbeda dengan di negara-negara maju. Ini antara lain disebabkan mundurnya kerajinan rakyat dan industri-industri kecil lainnya sehingga tenaga kerja yang berpindah ke kota-kota dan yang tidak dapat ditampung oleh industri-industri yang tumbuh dikota-kota ini terpaksa mencari lapangan hidup di sektor jasa. Pertumbuhan sektor administrasi negara yang menyolok yang tidak diimbangi oleh adanya kebutuhan jasa administrasi yang realistis dari masyarakat adalah merupakan salah satu contoh mengenai sifat keterbelakangan dalam sektor jasa di negara-negara terbelakang. Ini berbeda dengan keadaan sektor jasa atau administrasi negara di Amerika Serikat yang kendatipun presentase tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa secara keseluruhan relatif tinggi, tetapi sektor jasa ini tumbuh sebagai

akibat adanya permintaan efektif untuk itu dan sektor jasa ini banyak menampung tenaga-tenaga professional yang jasa-jasanya sangat dibutuhkan oleh sektor-sektor lain dalam ekonomi. Dalam mendukung tesis ini, Samir Amin antara lain mengemukakan contoh-contoh pertumbuhan sektor jasa terutama kegiatan administrasi di negara-negara Afrika Utara, Afrika Barat dan Afrika Tengah.

Thesis 4: Proses spesialisasi internasional yang tidak adil juga menimbulkan distorsi di negara-negara terbelakang dalam bentuk penggunaan teknik-teknik produksi modern yang padat modal untuk kegiatan-kegiatan yang ringan. Keputusan dalam memilih teknik produksi untuk operasi industri-industri ringan yang memproduksi barang-barang konsumsi di negara-negara terbelakang seluruhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip *marginalist* yang dianut dalam perhitungan bisnis dalam sistem kapitalis internasional. Prinsip-prinsip *marginalist* ini ditentukan oleh bentuk persediaan faktor-faktor produksi. Berdasarkan prinsip-prinsip ini sebetulnya negara-negara terbelakang yang mempunyai tenaga kerja yang jauh berlimpah dibandingkan dengan faktor modal secara rasional harus memilih teknik produksi yang ringan (yang menggunakan relatif banyak tenaga kerja). Timbul pertanyaan kenapa negara-negara terbelakang memilih teknik produksi padat modal dalam industri-industri ringan yang dikembangkan dalam negara-negara ini? Jawabannya dapat diterangkan dalam dua segi yang berikut:

- a. Adanya penentuan yang datang dari pihak luar yaitu pemilik-pemilik modal asing yang datang menginvestasi modal mereka dalam membina industri-industri ringan ini. Umumnya pemilik-pemilik modal ini datang membawa mesin-mesin sebagai penyertaan mereka dalam perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan di negara-negara terbelakang.
- b. Adanya pemikiran bahwa penggunaan tenaga kerja yang relatif lebih banyak dalam proses produksi akan tidak menjurus kepada pemupukan surplus yang tinggi dalam waktu singkat untuk digunakan dalam proses reinvestasi. Penggunaan faktor modal yang relatif intensif akan memperti-

mengakibatkan merosotnya pendapatan mereka dan menghancurkan hubungan-hubungan sosial yang utama di desa-desa. Daerah pedesaan menjadi daerah-daerah proletariat dan tanah-tanah yang dimiliki perorangan menjadi berkurang sehingga timbul pengusaha tanah secara komunal berdasarkan sistem bergilir. Penanaman padi menurun sebagai akibat menurunnya waktu kerja yang dapat digunakan untuk ini dan juga sebagai akibat berkurangnya perawatan atas tanah-tanah yang digunakan untuk tanaman padi.

Daerah-daerah lain di pulau Jawa yang banyak mengalami eksekusi buruk dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel* ini sehingga Geertz sampai kepada kesimpulan bahwa perkembangan produksi komoditi ekspor dalam rangka sistem tanam paksa telah dibiayai dengan sumber-sumber yang ada pada kaum tani, pembiayaan mana adalah merupakan pembiayaan yang telah mengikat penggang mereka. Apa yang dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan yang dikemukakan di sini mengenai pelaksanaan sistem tanam paksa ialah bahwa telah terjadi pengalihan surplus ekonomi dari Indonesia ke negeri Belanda dengan cara eksploitasi yang mirip perbudakan atas massa rakyat petani di mana dalam proses eksploitasi ini telah terjalin Aliansi di antara pemerintah kolonial Belanda di Indonesia yang mewakili kepentingan negeri Belanda dengan pihak-pihak penguasa feodal di Indonesia yang juga turut menikmati surplus ekonomi ini walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Juga apa yang dapat disimpulkan di sini ialah bahwa sistem tanam paksa telah mengakibatkan menciutnya golongan petani berkecukupan, memperluas golongan proletariat desa dan memperkuat golongan *aristocrat* dan kelas penguasa feodal yang dekat dengan pemerintah kolonial Belanda.

Penghapusan sisten tanam paksa yang diikuti dengan masuknya modal-modal swasta Belanda ke Indonesia sesudah tahun 1870 membuka cara baru pihak penjajah Belanda dalam mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Cara baru ini nampak lebih sopan karena tidak ada unsur paksaan yang brutal dilakukan. Tetapi jika kita lihat secara teliti, efek yang ditimbulkannya pada dasarnya sama saja yaitu pengalihan sebagian besar surplus ekonomi dari Indonesia ke negeri Belanda. Perkebunan-

perkebunan besar komoditi-komoditi primer di Jawa dan Sumatera telah tumbuh sebagai sektor-sektor "enclave" dalam struktur ekonomi Indonesia yang bukan saja dikuasai oleh pihak asing tetapi juga seluruhnya berorientasi keluar negeri yaitu ke metropolis-metropolis disentrum sistem kapitalis dunia baik ditinjau dari sudut sistem produksi maupun dari sudut pelemparan hasil-hasil produksi. Sifat dualistis dalam struktur ekonomi Indonesia diperluas dan diperkuat oleh operasi perkebunan perkebunan besar ini di samping operasi unit-unit pertambangan yang juga turut mengiringi pemasukan modal untuk sektor-sektor perkebunan besar ini.

Dalam pelaksanaan operasi perkebunan-perkebunan besar ini, pribumi Indonesia berperanan hanya dalam menyediakan buruh murah dan menyewakan tanah-tanah. Buruh murah diperoleh dari rakyat yang sudah menjadi golongan proletariat di daerah pedesaan sebagai akibat sistem tanam paksa dan tanah-tanah untuk disewa diperoleh dari penguasa-penguasa feodal yaitu golongan *aristocrat* yang merupakan keturunan dari raja-raja dan kelompok-kelompoknya dari sistem kesultanan di Jawa dan Sumatra Utara. Golongan penguasa feodal dan kelompok *aristocrat* lainnya ini kembali berperanan dalam operasi modal asing di Indonesia pada waktu zaman penjajahan Belanda tetapi perannya mereka tidaklah sebesar pada waktu pelaksanaan penyerahan paksa di zaman V. O. C maupun pada waktu pelaksanaan *Cultuurstelsel*. Aliansi di antara pemilik modal swasta asing dengan penguasa feodal dan golongan *aristocrat* terjadi dan sifat aliansi ini sama seperti sifat aliansi yang berkembang di antara pemerintah kolonial Belanda dengan golongan penguasa feodal dan golongan *aristocrat* lainnya pada waktu pelaksanaan *Cultuurstelsel* yaitu dalam bentuk mempermudah pengalihan surplus ekonomi Indonesia keluar negeri. Dalam aliansi ini golongan *aristocrat* feodal juga memperoleh sebagian dari surplus ekonomi yang dihasilkan oleh operasi modal asing ini.

Proses ini ditambah dengan konjunktur yang terjadi di pasar dunia terhadap pasaran komoditi-komoditi primer yang diekspor dari Indonesia telah merupakan faktor utama selain daripada akibat-akibat...

ditimbulkan oleh sistem tanam paksa dahulu bagi kemerosotan tingkat hidup rakyat. Hal ini antara lain tercermin dari kenyataan lebih rendahnya kenaikan produksi bahan makanan dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk pada zaman sesudah modal swasta asing beroperasi di bidang sektor komoditi primer di Indonesia. Kenyataan tersebut telah mengundang kritik pedas dari golongan sosialis di negari Belanda. Yustiar Basri antara lain mengemukakan kecaman yang dilontarkan Brooschooft, seorang politikus yang berpikiran sosialis sebagai berikut:

"Politik liberal mementingkan prinsip kebebasan terutama memberi kesempatan bagi pengusaha untuk memakai tanah rakyat dan segala peraturan dibuat untuk melindungi para pengusaha Belanda sendiri antara lain dalam soal memiliki atau menyewa tanah, undang-undang perburuhan dan undang-undang pertambangan. Akibat dari perkembangan semacam ini mendorong orang-orang yang kehilangan tanah menyewakan tenaganya dipabrik, sehingga mereka mengalami demoralisasi dan karena itu timbul disorganisasi masyarakat"

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* dan operasi modal swasta asing dalam sektor-sektor komoditi primer di pulau Jawa sebagai akibat balas jasa terhadap pemimpin-pemimpin lokal dan sebagai akibat proses akumulasi sebagian dari surplus ekonomi oleh golongan aristokrat, pegawai-pegawai pemerintah, agen-agen pemerintah kolonial dan golongan borjuis kecil di sektor perdagangan hasil bumi, maka timbullah penguasaan tanah yang relatif luas oleh golongan partikulir. Tanah-tanah partikulir ini terdapat di sekitar Jakarta (daerah antara Jakarta dan Bogor), sebagian daerah Banten, Krawang, Cirebon, Semarang dan Surabaya. Tanah-tanah ini berbeda dengan tanah-tanah di pedalaman Jawa yang berada dalam yurisdiksi penguasa-penguasa feodal. Golongan partikulir yang menguasai tanah-tanah partikulir ini timbul sebagai tuntunan tanah dan dalam kegiatan mereka, mereka melakukan eksploitasi terhadap rakyat petani yang tinggal di atas tanah-tanah ini. Proses eksploitasi dilakukan dengan cara mengenakan sewa tanah dan berbagai pajak di samping memeras tenaga rakyat ini dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan oleh para tuan tanah. Di samping ini tanah-tanah partikulir ini juga diusahakan dengan

mengerahkan petani-petani yang tinggal di atas tanah-tanah ini untuk memproduksi tanaman-tanaman tertentu dan menyerahkan sebagian hasil tanaman ini kepada tuan tanah. Proses hubungan ekonomi yang terjadi antara tuan tanah dengan petani-petani yang tinggal di atas tanah-tanah partikular ini, disebabkan pihak petani merupakan pihak yang lemah posisinya, telah menjurus kepada penindasan. Penindasan tersebut berakibat timbulnya petani yang akhirnya hanya bekerja di atas tanah-tanah partikular ini melulu sebagai buruh tanpa mendapat bagian lagi dari hasil tanaman dan terbelenggu oleh hutang dengan tuan rumah. Penindasan ini akhirnya mengakibatkan tersingkirnya para petani dari tanah-tanah partikular ini akibat tidak sanggupnya mereka menerima kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh para tuan tanah ini. Pada tahun 1915 di Jawa terdapat 582 tanah partikular yang meliputi luas sekitar 1,3 juta bau dan menyengat kehidupan hampir 2 juta manusia dengan memperhitungkan kelas tuan tanah yang berbasis di desa-desa. Karl Pelzer melaporkan bahwa di seluruh Jawa jumlah tuan tanah yang menguasai lebih dari 17,7 hektar tanah telah bertambah dari 1209 orang pada tahun 1905 menjadi 2178 orang pada tahun 1925.

Dua sektor ekonomi yang berasingan tempat yaitu sektor modern yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan produksi komoditi primer untuk tujuan ekspor yang dikuasai oleh modal asing, dan sektor agraris tradisional di mana sebagian besar massa rakyat menggantungkan hidup mereka, dihubungkan oleh para pedagang perantara. Para pedagang perantara ini yang berperan sebagai penjual barang-barang yang diperlukan penduduk di sektor agraris tradisional dan pembeli hasil-hasil pertanian. Dalam menjual barang-barang yang diperlukan penduduk di sektor agraris tradisional, pedagang-pedagang ini mengenakan harga yang relatif tinggi sedangkan dalam membeli hasil-hasil pertanian dari penduduk di sektor agraris tradisional mereka memberikan harga yang relatif rendah. Sebagai akibat dari proses pertukaran yang tidak adil ini maka proses hilangnya kekayaan (*decapitalization*) di pihak penduduk di sektor agraris tradisional pun terjadi. Ini mengakibatkan meluasnya golongan penduduk yang tak bertanah di sektor agraris tradisional.

makin bertambahnya golongan miskin desa. Untuk mendapat gambaran mengenai presentase golongan miskin desa di zaman penjajahan Belanda, baiklah di sini dikemukakan hasil studi Rutgers yang dipetik dalam studi Wertheim Pada tahun 1926, golongan miskin desa yaitu golongan petani miskin, buruh tani dan lapisan buruh lainnya di pedesaan Jawa telah merupakan 62,5 persen dari seluruh penduduk pedesaan Jawa. Sebagian dari golongan miskin desa ini berpindah ke kota-kota menjadi kaum miskin kota dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak stabil dan sebagian kecil menjadi proletarian industri.

Para pedagang di sektor modern yang tidak menjadi perantara dalam hubungan ekonomi antara sektor modern dengan sektor agraris tradisional hanya berperan sebagai pihak yang umumnya melayani permintaan kaum buruh yang bekerja di sektor modern dan juga para pekerja di sektor administrasi dan jasa. Kedua kelompok ini tidaklah memberikan permintaan efektif yang besar untuk dapat menimbulkan kelas pedagang besar nasional sebagai kelas yang potensial untuk menjadi borjuis industri nasional. Para pedagang di sektor modern ini hanya tumbuh sebagai borjuis kecil (*petty bourgeoisie*).

Apa yang dapat disimpulkan di sini sebagai efek operasi modal asing di sektor komoditi primer yang telah memperkuat dualism ekonomi dalam struktur ekonomi Indonesia dalam pengertian kemakmuran kelas adalah sebagai berikut:

1. Golongan feodal yang turut menikmati surplus ekonomi mengalami posisi ekonomi yang bertambah kuat
2. Berkembangnya golongan perantara yang juga turut menikmati surplus ekonomi sebagai akibat proses tukar menukar yang tidak adil dengan penduduk di sektor agraris tradisional
3. Bertambah lemahnya posisi ekonomi sektor agraris secara keseluruhan walaupun golongan petani kaya dan menengah masih dapat bertahan dengan berbagai cara.
4. Golongan miskin desa bertambah banyak dan ini merupakan golongan terbesar di daerah pedesaan. Kelas tuan tanah yang berpangkalan di kota-kota dan didesa-desa yang berperan sebagai pihak-pihak yang

- menikmati penghasilan dari penyewaan (tanah, kegiatan industri, kegiatan-kegiatan jasa lainnya juga turut mengalami posisi ekonomi yang lebih baik).
- 5. Bertambah luasnya kaum miskin kota dan timbulnya golongan industri dan proletariat perkebunan
- 6. Golongan kapitalis asing yang menguasai keseluruhan sektor ekonomi primer menguasai sebagian surplus ekonomi yang diekspor dari sektor ekspor komoditi-komoditi primer yang menunjukkan betapa besarnya Surplus ekonomi yang bertambah besar menunjukkan betapa bertambah baik dan kokohnya posisi ekonomi golongan ini.

Dalam zaman penjajahan Belanda di Indonesia golongan primer secara keseluruhan ditinjau dari sudut posisi ekonomi adalah berada dalam posisi terbawah. Posisi paling atas diduduki oleh golongan Eropa dan diikuti oleh golongan Timur Asing (sebagian besar terdiri dari golongan Cina).

Struktur ekonomi dualistis dan situasi ekonomi berbagai kelas dalam masyarakat seperti yang disebutkan di atas adalah bangunan struktur dalam sistem ekonomi ekonomi dan sosial di Indonesia yang diwarisi dari zaman kolonial Belanda dan di atas landasan bangunan struktural ini Indonesia mengisi kemerdekaannya. Bangunan struktural ini pada zaman pemerintahan sebelum pemerintahan Pasca 1966 sebetulnya diusahakan untuk dirombak dalam suatu penstrukturan kembali masyarakat tetapi usaha ini tidak berhasil dilaksanakan. Pengalihan penguasaan sektor perkebunan dan sebagian sektor pertambangan menjadi milik negara Indonesia adalah satu-satunya perombakan bangunan struktural yang dapat dilaksanakan walaupun pengalihan ini telah diikuti dengan ketidakefisienan operasi unit-unit ekonomi ini. Perombakan penguasaan unit-unit ekonomi di daerah pedesaan dari golongan Cina ke golongan pribumi tidak dilakukan dalam konteks penstrukturan kembali masyarakat tetapi banyak dilandasi oleh rasialisme sehingga struktur tetap tidak berubah.

Sewaktu pemerintah Pasca 1966 mengambil alih pemerintahan di mana politik pintu terbuka terhadap modal asing dilaksanakan seluas-

luasnya dan perombakan struktur sosial dalam arti kata perombakan sifat hubungan ekonomi antar kelas tidak diadakan menunjukkan bahwa bangunan struktural yang telah diwarisi dari zaman kolonial Belanda ini telah secara sadar dijadikan landasan struktural di mana kebijaksanaan ekonomi dijalankan. Kenyataan-kenyataan yang kemudian dijumpai dalam proses ekonomi Indonesia di zaman pemerintahan Pasca 1966 yang tumbuh di atas bangunan struktural yang dualistis dan tidak egalitarian menunjukkan ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh pencetus-pencetus tesis ketergantungan dan keterbelakangan.

Di bawah ini beberapa aspek proses ekonomi Indonesia dalam pemerintah Pasca 1966 dianalisis satu-persatu.

a. Sifat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi telah diiringi dengan bertambah lebarnya jurang pendapatan di antara golongan kaya dengan golongan miskin. Pertambahan produk domestik bruto riil per kapita secara rata-rata per tahun sebesar 5,4 persen dalam periode 1970-1976 telah diiringi dengan naiknya indeks ketidakmerataan konsumsi per kapita dari 0,33 pada tahun 1970 menjadi 0,41 pada tahun 1976. Sementara itu dalam itu dalam periode ini, golongan miskin ternyata bertambah miskin sehingga mereka tidak menikmati sama sekali pertumbuhan ekonomi dalam periode ini. Tingkat konsumsi riil per kapita golongan miskin telah turun sebesar 25 persen sedangkan tingkat konsumsi riil per kapita golongan yang tidak miskin telah naik sebanyak 23 persen dalam periode ini. Sementara itu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan selama periode 1970-1976 tidak berubah yaitu sebesar 59 persen.

Hilangnya banyak industri kecil di pedesaan, kesempatan memperoleh nafkah di daerah pedesaan baik berupa hilangnya kesempatan kerja maupun menyempitnya peluang bagi banyak proletariat desa untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi pertanian dan menurunnya tingkat upah sebagai akibat berubahnya sistem hubungan kerja dan bertambah tingginya penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan yang ditimbulkan oleh proses produksi yang sudah

mengalami mekanisme merupakan sebagian faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan posisi ekonomi golongan miskin ini di daerah pedesaan. Proses terjadinya faktor-faktor ini bersumber dari pencangkakan sistem komersialisasi kapitalis dan metode produksi modern ke dalam masyarakat desa Indonesia di mana kondisi-kondisi institusional dan realitas sosial yang ada adalah sedemikian rupa sehingga pencangkakan ini cenderung melemparkan banyak penduduk dari sistem produksi dan proses pemanfaatan hasil-hasil produksi.

Teknologi baru yang diperkenalkan di sektor pertanian tradisional yang diharapkan dapat menimbulkan potensi kenaikan produktivitas pertanian telah menimbulkan efek pengurangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tradisional ini.

Suatu studi atas sampel unit pertanian yang representatif di Jawa Timur menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja per hektar tanah pertanian telah berkurang sesudah unit-unit pertanian ini menggunakan bibit unggul dibandingkan pada waktu unit-unit pertanian ini menggunakan bibit lokal yang biasa. Penggunaan tenaga kerja diukur dalam hari kerja per hektar telah berkurang dari 260 hari kerja menjadi 230 hari kerja. Suatu studi lain di daerah Yogyakarta atas sejumlah sampel unit pertanian menunjukkan situasi yang sama di mana penggunaan tenaga kerja per hektar telah berkurang dari 317 hari kerja pada waktu bibit lokal biasa yang digunakan menjadi 317,6 hari kerja pada waktu bibit unggul yang digunakan.

Pemakaian sabit untuk menggantikan ani-ani juga telah menimbulkan pengurangan penggunaan tenaga kerja dalam unit-unit pertanian di sektor pertanian tradisional. Suatu studi menunjukkan bahwa pemetikan panen dengan menggunakan ani-ani membutuhkan kira-kira 200 hari kerja per hektar unit pertanian dibandingkan dengan 75 hari kerja pada waktu sabit yang digunakan. Studi lain menunjukkan situasi yang sama di mana sebanyak 2 orang pria yang menggunakan sabit menggantikan sebanyak 46 orang wanita yang selama ini

menggunakan ani-ani dalam memetik padi di suatu unit pertanian yang sama.

Proses traktorisasi unit-unit pertanian di sektor pertanian tradisional adalah merupakan bentuk lain dalam penggunaan teknologi baru yang telah juga menyebabkan pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tradisional ini. Morris menyatakan bahwa efek mekanisasi pengolahan tanah terhadap hasil produksi oleh petani kecil di mana selain ditunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja telah berkurang juga ditunjukkan bahwa penggunaan alat-alat mekanis pengolahan tanah tidak diikuti oleh kenaikan produksi. Studi Rudolf Sinaga di daerah Indramayu, Jawa Barat menunjukkan bahwa penggunaan satu traktor mini diperkirakan menggantikan lebih kurang 2210 hari kerja buruh tani.

Menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian telah dihubungkan pula dengan masuknya huller-huller kecil yang telah menggantikan begitu banyak tenaga kerja dalam kegiatan menumbuk beras di desa-desa yang selama ini telah merupakan salah satu sumber penghidupan tambahan bagi banyak keluarga. Suparmoko dan kawan-kawan dalam suatu penyelidikan alas suatu sampel unit-unit huller di pulau Jawa mengenai pengaruh penggunaan huller terhadap penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan sesudah panen mengemukakan mengenai hilangnya kesempatan kerja pada satu musim tanam pada tahun 1972 bagi 3701 buruh penumbuk padi per huller di Jawa Barat, hilangnya kesempatan kerja bagi 3229 buruh penumbuk padi per huller di Jawa Tengah dan hilangnya kesempatan kerja bagi 482 buruh penumbuk padi per hektar.

Berdasarkan angka-angka yang dikemukakan Suparmoko dan kawan-kawan ini William Collier dan kawan-kawan mengemukakan perkiraan bahwa jumlah tenaga kerja yang digantikan oleh seluruh huller (3972) di pulau Jawa pada tahun 1971 adalah sebanyak 7,7 juta orang buruh penumbuk padi pada satu musim panen. Pengalihan sistem pemetikan panen dari sistem *bawon* ke sistem *tebasan* telah menimbulkan pengurangan tenaga kerja yang digunakan pada waktu panen. Ini

adalah konsekuensi logis oleh karena berbeda dengan sistem *bawon* di mana kelompok-kelompok orang dari sekitar unit pertanian yang sedang panen datang menyumbangkan tenaga memetik panen dengan mendapat pembagian tertentu dari panen yang dipetik, sistem *tebasan* adalah sistem pemetikan hasil panen yang dilaksanakan atas pengelolaan dan penguasaan pihak penebas yaitu *pengijon* yang ingin menghemat biaya sebesar-besarnya (biaya dalam pengertian nilai moneter hasil panen yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan tenaga kalau upah berbentuk hasil panen atau upah yang dibayarkan yang didasarkan kepada tingkat upah yang berlaku di sektor pertanian tradisional di desa-desa).

William Collier melaporkan suatu situasi di desa Banyutowo, Jawa Tengah, di mana jumlah orang yang bekerja untuk memetik panen per hektar sawah dengan sistem *bawon* jauh lebih banyak dibandingkan dengan sawah dengan sistem *tebasan*, yaitu 425 orang per hektar dengan sistem *bawon* dan 194 orang per hektar dengan sistem *tebasan*. Penyelidikan Utami dan Ihalauw di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menunjukkan situasi yang lebih parah. Penyelidikan menunjukkan bahwa sawah dengan sistem *bawon* memperkerjakan 480 orang per hektar sedangkan sawah dengan sistem *tebasan* hanya menggunakan 21 orang per hektar.

Proses tersingkirnya atau tercampaknya banyak orang dari sistem produksi pertanian tradisional dan seiring dengan itu menurunnya pendapatan riil per kapita orang-orang ini, dapat dikatakan adalah sebagai akibat dari masuknya sistem produksi pertanian yang pada hakikatnya berorientasi kepada sistem produksi pertanian di negara-negara maju di mana tidak terdapat surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan proses maksimisasi surplus yang terjadi adalah proses maksimisasi surplus yang didasarkan kepada perhitungan *marginalist* bisnis. Hal ini menunjukkan kesejajaran dengan apa yang dikemukakan oleh Samir Amin bahwa proses integrasi ekonomi negara-negara terbelakang ke sistem kapitalis dunia dan mekanisme integrasi yang mengiringinya dalam berbagai bentuk ketergantungan

telah mengakibatkan negara-negara terbelakang terpaksa membuat keputusan untuk memilih teknik produksi yang padat modal untuk kegiatan-kegiatan yang pada hakikatnya ringan. Hal ini dilakukan meskipun ada surplus tenaga kerja murah yang secara rasional mengharuskan mereka memilih teknik produksi yang padat karya. Pemikiran ini ternyata juga dianut oleh Rudolf Sinaga, seorang ekonom pertanian Indonesia yang banyak melakukan penelitian di bidang ekonomi pedesaan. Rudolf Sinaga mengemukakan pendapat sebagai berikut mengenai salah satu aspek ekonomi pedesaan:

"Upah buruh sekarang turun. Tetapi mengherankan ketika upah itu murah, mesin datang menggantikan tenaga mereka. Terjadi substitusi, Hal semacam ini tentunya bukan kehendak atau permintaan pasar. Rupanya *market forces* di sini tidak bekerja. Ia diganggu. Kalau *market forces* bekerja dan tidak diganggu, tentu substitusi tidak terjadi dalam arti tenaga buruh saja yang dipakai dan tidak dipergunakan mesin untuk menggantikan. Dalam hal ini, masuknya mesin adalah akibat dari kebijaksanaan yang ditempuh. Pasar diganggu oleh kebijaksanaan ini atau dengan kata lain *market forces* mendapat intervensi dari pemerintah".

Mengenai tersingkirnya atau tercampaknya banyak orang dari sistem produksi di sektor pertanian tradisional, kembali Rudolf Sinaga mengemukakan observasi yang menarik sebagai berikut: "Di pedesaan kini memang terlihat suatu perubahan di mana peranan nonpertanian semakin *significant*. Dengan hanya melihat ini seolah-olah kita sudah beranjak menuju industri. Tetapi sebenarnya, kalau kita pelajari di dalam, seharusnya itu tidak menggembirakan, karena perpindahan orang dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian bukanlah karena keadaan pada nonpertanian lebih baik. Mereka yang pindah itu adalah orang-orang yang diterjang (*pushed out*) dari dalam. Pertanian tidak lagi mampu memberi pendapatan. Mereka terpaksa keluar dan masuk ke sektor baru yang tidak lebih baik dari pertanian. Kasus ini berbeda dengan kasus di Korea Selatan misalnya. Di Korea Selatan orang-orang

masuk ke sektor nonpertanian adalah mereka yang "ditarik", bukan "terlempar" ke sana".

Observasi ini mengandung makna bahwa sebenarnya di pedesaan Indonesia tidak terjadi proses transformasi dalam pengertian perkembangan oleh karena dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya terjadi proses akumulasi surplus tetapi tidak terjadi proses pengangkatan tingkat kehidupan manusia. Dalam konteks sektor pertanian tradisional Indonesia, thesis Samir Amin mengenai tidak bebasnya negara-negara terbelakang dalam memilih teknik produksi sebenarnya bukan hanya ditimbulkan adanya berbagai bentuk ketergantungan, tetapi ditimbulkan oleh politik tingkah laku pembuat keputusan nasional yang melakukan pembelian-pembelian. Namun demikian ketidakbebasan ini tidaklah disesali oleh pembuat keputusan nasional, karena keputusan untuk mensubstitusikan tenaga kerja dengan mesin di sektor pertanian tradisional pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari strategi pertumbuhan yang diformulasikan atas dasar *capital output ratio*.

Surplus ekonomi yang diakumulasi sebagai akibat dari substitusi mesin terhadap tenaga kerja di sektor pertanian tradisional tentu mengurangi bahagian buruh (*labour share*) dalam surplus ini, baik secara absolut maupun secara relatif. Bahagian terbesar dari surplus ini akhirnya akan jatuh kepada pihak-pihak yang dapat secara ekonomis mengusahakan unit-unit pertanian, kepada pedagang-pedagang yang menghubungkan sektor pertanian tradisional dengan sektor modern, kepada importir mesin-mesin pertanian dan akhirnya kepada produsen-produsen mesin pertanian di sistem kapitalis dunia. Dalam konteks Indonesia, sebagian dari surplus ini jatuh kepada birokrat tingkat nasional. Pengalihan surplus ekonomi telah terjadi dari massa rakyat di sektor pertanian tradisional ke metropolis pada sistem kapitalis dunia melalui "tukang-tukang antarnya" (*delivery agents*) di Indonesia yaitu kelas yang menguasai perdagangan perantara antara desa dan kota, kelas yang menguasai perdagangan impor dan kelas

penguasa baik di desa maupun disentrum pemerintahan nasional yang telah memungkinkan proses ini berjalan dengan lancar dan intensif.

Pada hakikatnya proses pengalihan surplus ini sama saja dengan proses pengalihan surplus yang terjadi pada waktu pelaksanaan penyerahan paksa di zaman V.O.C. dan pada waktu pelaksanaan tanam paksa di zaman *Cultuurstelsel* pada periode kolonial Belanda dahulu. Kalau dulu proses pengalihan surplus ini dilakukan secara brutal, disertai dengan **kehadiran politis** pihak asing di Indonesia, maka sekarang proses pengalihan surplus ini dilakukan secara halus atas nama modernisasi dan pembangunan tanpa **kehadiran politis** asing di Indonesia.

Sektor ekstraktif pertambangan yang merupakan sektor paling utama dalam sektor modern dan yang sebagian besar produksinya dikuasai oleh modal asing adalah merupakan sektor yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya. Misalnya selama periode 1967-1976, tingkat elastisitas pertumbuhan sektor ini mencapai tingkat 3,56 sedangkan tingkat elastisitas pertumbuhan sektor pertanian di mana sebagian besar, rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya hanya sebesar 0,35. Sebagai akibat kompetisi dan faktor-faktor institusional lainnya yang telah menghambat perkembangan subsektor ini subsektor pertambangan minyak dan gas bumi subsektor yang mana dalam sektor pertambangan, merupakan suatu "*economic enclave*" terbesar di dalam struktur ekonomi Indonesia, tidak berkaitan dengan sektor tradisional dan juga tidak menimbulkan efek pengganda yang berarti terhadap pendapatan domestik. Elastisitas produksi (*output elasticity*) sektor pertanian dalam hubungannya dengan produksi sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kaitan ekonomi di antara keduanya yang diperoleh dengan melakukan regressilog nilai tambah sektor pertanian atas nilai tambah subsektor pertambangan minyak dan gas bumi ternyata menunjukkan angka yang relatif kecil sekali.

Sifat dualistis dari struktur ekonomi Indonesia yang secara sistematis sudah dibina dan dikembangkan dalam zaman pelaksanaan

Cultuurstelsel dan operasi modal swasta Belanda dan asing lainnya sektor komoditi primer sesudah penghapusan *Cultuurstelsel* pada zaman kolonial Belanda, tetap bertahan dalam proses ekonomi kemerdekaan dan cenderung makin kokoh dalam proses ekonomi pasca 1966. Pada hakikatnya, strategi "leading sectors" menurut para berpikir sarjana-sarjana ekonomi Barat yang telah diterapkan di Indonesia sejak Pasca 1966 dapat dipandang merupakan lanjutan dari strategi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda "Tropical Holland" (nama julukan untuk Indonesia) pada zaman penjajahan dahulu. Penemuan-penemuan mengenai kemerosotan upah riil per pekerja di sektor pertanian yang diperkirakan sebagian besar golongan miskin di Indonesia berada, adalah konsisten dengan penemuan yang dikemukakan sebelumnya mengenai bertumbuhnya miskinnya golongan miskin di Indonesia selama periode 1970-1980. Ternyata nilai tambah per pekerja di sektor pertanian tidak menggambarkan posisi ekonomi pekerja yang sebenarnya di sektor ini.

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Angka-angka angkatan kerja di berbagai sektor menunjukkan bahwa sektor jasa memperkerjakan orang yang secara relatif tinggi. Pada tahun 1976, angkatan kerja di sektor pertanian sebanyak 58,8 persen dari keseluruhan angkatan kerja diikuti oleh angkatan kerja di sektor jasa sebanyak 26,3 persen dari keseluruhan angkatan kerja sehingga sektor jasa adalah sektor yang paling banyak menggunakan tenaga kerja sesudah sektor pertanian. Oleh karena sektor industri tidak menyerap banyak tenaga kerja akibat teknologi padat modal yang digunakan di sektor ini demikian juga di sektor ekstratif dan sektor-sektor modern lainnya, maka sesudah memperhitungkan orang-orang yang bekerja di sektor "informal" yang kemungkinan besar tidak seluruhnya tercakup dalam angka-angka angkatan kerja, maka apa yang disebut Samir Amin situasi "*hypertrophy of the tertiary sector*" terdapat juga di Indonesia. Situasi ini ialah situasi di mana presentase angkatan kerja yang relatif tinggi di sektor jasa bukan merupakan hasil evolusi dari kenaikan produktivitas. Bertambah banyaknya orang-orang yang bekerja dalam jenis-jenis pekerjaan yang tak stabil seperti

pembantu rumah tangga, tukang angkat bongkar, buruh kasar pengangkutan, buruh lepasan dalam proyek-proyek konstruksi, tukang becak, pedagang kaki lima, pelacur dan lain-lain di samping pekerja-pekerja administrasi negara yang berjubel di kantor-kantor pemerintah menunjukkan situasi ini. Sektor jasa di Indonesia bukanlah terdiri dari para professional terdidik dan terlatih seperti yang terdapat di negara-negara maju yang berada di sektor ini karena adanya permintaan efektif dari sektor-sektor ekonomi lainnya.

Buruh yang diserap di subsektor industri besar dan menengah di sektor modern yang banyak terdiri dari industri-industri substitusi impor dengan dukungan modal asing yang bertujuan untuk mempekerjakan buruh murah dan yang tak terlatih adalah kumpulan orang yang bekerja dengan prospek karier yang rendah dengan yang rendah. Mereka dibayar rendah oleh karena mereka tidak mempunyai alternatif lain dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tersingkir dari sistem produksi di sektor pertanian tradisional dipedesaan. Situasi ini menimbulkan apa yang disebut "*secondary labour market*" (pasar tenaga kerja yang sekunder) yaitu suatu pasar tenaga kerja yang menyediakan pekerjaan kepada orang-orang, tetapi dengan bayaran rendah dan tidak menimbulkan akumulasi buruh terlatih. Jelas ini bukanlah bentuk transformasi sosial seperti yang diartikan dalam literatur ekonomi pembangunan, oleh karena di sini tidak terjadi mobilitas sosial ke atas.

Tingkat pengangguran di Indonesia setelah memperhitungkan tenaga kerja yang tidak sepenuhnya produktif, karena waktunya kurang dimanfaatkan diperkirakan sekarang ini berkisar sekitar 30 persen dari angkatan kerja penuh. Ini tentu menunjukkan suatu situasi yang secara sosial dianggap gawai. Apakah yang menyebabkan ini? Jawabannya yang paling mudah dan yang sering kita dengar ialah pertumbuhan penduduk. Jarang kita dengar jawaban yang menyinggung atau yang mempertanyakan secara serius keseluruhan strategi dan kebijaksanaan yang dijalankan di Indonesia. Petunjuk-petunjuk yang ada menjelaskan bahwa strategi dan kebijaksanaan yang diselenggarakan

selama ini adalah strategi dan kebijaksanaan yang diintegrasikan atau disinkronkan dengan sistem produksi yang ada pada sistem kapitalis internasional. Dari sistem tersebut sebagian besar *impulses* datang sebagai akibat adanya ketergantungan dalam berbagai bentuk. Sehingga dengan itu timbul pemikiran elitist yang bersifat tidak ambil peduli terhadap realitas-realitas yang ada pada tingkat bawah masyarakat kelas dari pihak-pihak yang menganjurkan strategi pembangunan seperti ini.

Program industrialisasi di Indonesia yang berkonsentrasi di sektor modern, sehingga ketidakseimbangan disengaja, dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja yang berlebih di sektor pertanian tradisional di pedesaan jelas didasarkan kepada kerangka. Teori Arthur Lewis yang dikemukakannya pada era modern sehingga produktivitas batas buruh di sektor pertanian tradisional telah melebihi tingkat upah riil rata-rata yang berlaku di unit-unit industri di sektor modern. Phase inilah yang disebut sebagai phase perkembangan ekonomi di sektor pertanian tradisional sebagai akibat berkembangnya sektor industri modern yang menyerap seluruh surplus buruh di sektor pertanian tradisional ini dan bersamaan dengan itu meningkatnya tingkat upah riil di sektor pertanian tradisional. Model Lewis, Fei, Ranis ini ternyata sama sekali tidak tepat dalam menggambarkan situasi penyerapan buruh dari sektor pertanian tradisional oleh sektor modern di negara-negara terbelakang. Sebagai akibat dari ketergantungan teknologis dan keuangan, maka sistem produksi di sektor modern (dalam hal ini yang terutama dimaksudkan ialah sektor industri) adalah sangat bersifat padat modal sehingga asumsi yang *implicit* dalam model Lewis Fei Ranis di mana penyerapan tenaga kerja akan proporsional dengan tingkat pertumbuhan investasi sama sekali tidak tepat. Apa yang terjadi di negara-negara terbelakang ialah bahwa proses ekspansi produksi dalam sektor modern tidak menunjukkan penambahan penyerapan tenaga kerja.

Strategi dan kebijaksanaan ekonomi yang didasarkan kepada model Lewis Fei Ranis ini berakibat fatal terhadap kehidupan massa rakyat

dan tidak masuk akal kalau strategi dan kebijaksanaan seperti ini akan menjuruskan massa rakyat kepada kemakmuran apalagi kalau kita perhatikan bahwa pengangguran terbuka (*open unemployment*) sudah pula menjadi kenyataan di desa dan kota di Indonesia. Perpindahan penduduk dari sektor pertanian tradisional ke kota-kota di Indonesia bukanlah disebabkan oleh adanya penawaran upah nil yang lebih tinggi oleh industri-industri di kota-kota ini kepada mereka aid bat adanya situasi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) di kota-kota seperti yang dikemukakan oleh Lewis, Fei dan Ranis. Perpindahan penduduk ini adalah disebabkan oleh tidak adanya alternatif lain bagi mereka di sektor pertanian tradisional sehingga mereka pindah ke kota-kota dengan penuh ketidakpastian. Dalam hal ini pasar tenaga kerja yang sempurna seperti yang diasumsikan Lewis, Fei dan Ranis tidak terdapat di Indonesia.

c. Proses Industrialisasi

Pengembangan industri substitusi impor dalam rangka industrialisasi di Indonesia jelas menunjukkan apa yang disebut Samir Amin "*extravert orientation of the industries*" yang menggambarkan industri-industri yang sangat berorientasi keluar negeri. Ini sejajar dengan apa yang digambarkan oleh Gunder Frank mengenai industrialisasi di Brazilia dan Argentina dengan pusat-pusatnya di Sao Paulo dan Buenos Aires yang tergantung kepada metropolis di Amerika Serikat dan Inggris. Sritua Arif menggambarkan industri-industri substitusi impor di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Industri barang-barang dalam rangka *import substitution industries* ini ternyata banyak menggantungkan diri kepada input dari luar negeri;
- 2) Industri yang *import substitution* ini dalam pemilihan teknologinya dipercayai telah memilih teknologi yang relatif lebih padat modal dari alternatif-alternatif yang ada disebabkan barang modal sebagai input akibat adanya fasilitas-fasilitas fiskal dan biaya kredit yang sangat menarik dianggap lebih murah oleh karena mengandung komponen *cost of capital* yang relatif lebih murah.

Juga murahnya komponen *cost of capital* barang-barang modal menyebabkan biaya mempertahankan *excess capacity* juga relatif rendah;

- 3) Sebagian besar industri ini berlokasi di Jakarta Raya dan daerah sekitarnya dan Jakarta Raya dan daerah sekitarnya telah turut menjadi suatu industri-industri substitusi impor ini tergantung pada luar negeri dari segi *input* dan teknologi produksi. Hal ini disebabkan banyak industri tersebut merupakan industri yang dikuasai modal asing atau campuran asing dan lokal di mana penyertaan pihak asing dalam struktur modal sebagian besar berbentuk mesin-mesin menurut pola produksi di negara-negara maju. Dengan demikian, sistem kapitalis industri yang mengiringi perkembangan industri substitusi impor ini adalah jelas seperti apa yang disebut Dos Santos sebagai "*dependent production and reproduction*". Pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh industrialisasi semacam ini tentu akan merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak bersentrum ke dalam negeri (*autocentric growth*) dan tidak berdasarkan dinamika yang ada di dalam negeri (*autodynamic growth*).

Sementara itu, oleh karena sebagian besar dari industri substitusi impor ini terdiri dari industri konsumsi yang memenuhi kebutuhan golongan kaya yang berada di kota-kota, maka sifat orientasi keluar negeri dari industri-industri ini seperti yang disebutkan di atas bersama-sama dengan sifat eksklusif dari konsumsi hasil-hasil ini membentuk suatu sektor "*industrial enclave*" yang sifatnya sama dengan *enclaves* yang terbentuk dalam sektor produksi bahan-bahan mentah primer. Selain daripada itu, sebagai akibat ketergantungan impor dan bermainnya penetapan "*transfer pricing*" yang akan menimbulkan suatu proses pertukaran yang tidak adil, maka strategi industrialisasi melalui pengembangan industri substitusi impor yang dimaksudkan untuk memperoleh penghematan devisa ada kemungkinan tidak memperoleh penghematan devisa yang berarti atau penghematan devisa mungkin negatif. *Resourec gap* selisih di

antara nilai ekspor dengan nilai impor untuk memperbesar volume ekspor komoditi-komoditi nonekstraktif dalam rangka memperluas kesempatan kerja. Dalam rangka tujuan ini, ekspor barang-barang industri dijadikan salah satu fokus perhatian.

Tindakan devaluasi dalam keadaan di mana sektor industri yang sudah demikian tergantungnya keluar negeri dalam keseluruhan *input* utamanya dan adanya ciri-ciri struktural yang sangat lemah dalam ekonomi massa rakyat Indonesia, akan cenderung menimbulkan distorsi dalam proses ekonomi. Devaluasi pada hakikatnya memberikan subsidi kepada pihak-pihak yang bergerak dalam produksi barang-barang ekspor (yang sebagian besar dikuasai oleh sektor modern) dan mengenakan pajak tak langsung terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang-barang impor dan barang-barang industri substitusi impor yang mengandung "*import content*" yang relatif cukup besar. Dalam hal ini, devaluasi mendorong terjadinya redistribusi yang regresif dalam pendapatan per kapita dan mungkin mengurangi penyerapan tenaga kerja jikalau industri-industri substitusi impor yang diharapkan dapat mengekspor hasil produksinya tidak dapat mengekspor dan mengurangi produksinya akibat naiknya biaya-biaya produksi.

Dalam teori perdagangan internasional disebutkan bahwa devaluasi diharapkan dapat menimbulkan keseimbangan dalam neraca perdagangan apabila jumlah elastisitas permintaan terhadap ekspor dan elastisitas permintaan terhadap impor lebih besar dari 1 dan elastisitas-elastisitas penawaran ekspor dan impor hendaklah tidak terhingga. Kondisi-kondisi ini dikenal sebagai "kondisi-kondisi Marshall Lerner" (Marshall Lerner Conditions). *Deficit* dalam neraca perdagangan di negara-negara terbelakang yang secara struktural memang bukanlah disebabkan oleh karena tingkat harga umum dalam negara-negara ini sejak semula tidak kompetitif dengan tingkat harga umum di negara-negara lain terutama di negara-negara maju, tetapi disebabkan oleh tidak berhasilnya negara-negara ini melakukan transformasi di dalam negeri sehingga sumber-sumber di dalam negeri

tidak dapat diarahkan untuk memproduksi barang-barang untuk keperluan di dalam negeri sehingga impor tidak dapat diminimumkan. Sementara itu permintaan terhadap ekspor dari negara-negara terbelakang tidak selamanya elastis.

d. Pembiayaan Pembangunan

Dalam hubungan ini sangat menarik untuk mengemukakan di sini pendapat Adi Sasono sebagai berikut: Persoalan yang barangkali mendasar dalam hubungan proses ketergantungan yang berlanjut ini (maksudnya ketergantungan keuangan, garis bawah oleh pengarang) adalah bahwa kepentingan ekonomi (dan politik) dari luar telah berjalan dengan kepentingan yang serupa dari elite yang memerintah. Berlanjutnya hutang luar negeri yang masuk ke dalam kas negara berarti memperkuat posisi elite ini. Sementara itu kegiatan ekspor impor yang menjadi bagian essensial dari sistem ekonomi liberal membawa keuntungan material terutama bagi kelompok-kelompok ekonomi yang telah mapan dan dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Nampak bahwa masalah terjadinya proses ketergantungan yang berlanjut dan meningkat dalam sepuluh tahun terakhir ini bukan masalah ekonomi semata-mata. Atau bahkan ia barangkali pertamanya masalah politik berkaitan dengan struktur kekuasaan yang ada.

Apa yang dikemukakan oleh Adi Sasono bahwa ketergantungan keuangan Indonesia terhadap luar negeri adalah merupakan produk dari suatu Aliansi di antara pihak yang mewakili metropolis dunia dengan elite penguasa di dalam negeri, Aliansi mana telah menimbulkan manfaat bersama dan juga kepentingan bersama.

Kendatipun Bank Dunia kelihatannya *beg concerned* dengan situasi ketergantungan keuangan Indonesia terhadap luar negeri, kita hendaklah jangan terpesona dengan anjuran atau pendapat Bank Dunia ini. Karena anjurannya ini sebenarnya bukan timbul dari iktikad untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia, tetapi semata-mata timbul dari adanya persaingan dengan pihak-pihak yang menyediakan pinjaman kepada Indonesia, karena pinjaman-pinjam komersil ini telah menjadi substitusi terhadap pinjaman-pinjaman dari Bank Dunia dan negara-

negara donor yang menopang Bank Dunia. Ada baiknya juga di sini dikemukakan dua aspek lagi yang tak kalah pentingnya dalam proses masuknya pinjaman luar negeri ke Indonesia.

Mengandalkan tabungan pemerintah yang telah bertambah besar persentasenya dalam pembiayaan keseluruhan pengeluaran pembangunan dibandingkan dengan pinjaman dan bantuan luar negeri telah menyembunyikan kenyataan mengenai ketergantungan Indonesia atas pemerintah itu. Ketergantungan Indonesia kepada pihak asing dalam pembiayaan pembangunan nasionalnya haruslah dilihat dari sudut sampai berapa besar kegiatan pihak asing telah bertanggungjawab dalam menghasilkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan ini, baik kegiatan pihak asing yang dilaksanakan di dalam Indonesia maupun kegiatan pihak asing yang dilakukan di luar Indonesia. Dalam pengertian inilah "ketergantungan keuangan" itu harus dilihat dalam konteks thesis ketergantungan seperti yang telah dikemukakan dalam bab yang terdahulu. Dalam pengertian inilah sebenarnya bagaimana pihak asing melihat ketergantungan Indonesia dari segi keuangan.

5.4 Persediaan Bahan Makanan

Dari sudut ekonomi maupun politik pertambahan produksi bahan makanan yang menuju kepada swasembada adalah merupakan suatu keharusan bagi Indonesia. Dari sudut ekonomi, swasembada akan memberikan efek positif terhadap neraca pembayaran apalagi dengan adanya trend, kenaikan harga bahan makanan di pasaran internasional sebagai akibat kenaikan biaya *input* untuk produksi bahan makanan ini seperti pupuk kimia, pestisida dan lain-lain. Untuk suatu situasi di mana perkiraan yang sedang berjalan menunjukkan posisi *deficit* (yang menunjukkan surplus impor termasuk impor bahan makanan) dan *deficit* mana telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri, seperti yang telah dialami Indonesia selama ini, maka pada hakikatnya Indonesia telah meminjam demi untuk makan. Dan oleh karena apa yang dimakan ini telah habis sebagai konsumsi, maka komponen pinjaman

telah tidak ditandingi oleh adanya pertambahan kapasitas produksi dalam bentuk akumulasi persediaan modal fisik yang produktif. Juga swasembada bahan makanan yang kemudian menjurus kepada surplus bahan makanan adalah mutlak perlu sebagai dasar di atas mana sektor industri berkembang karena dalam situasi ini para pekerja di sektor industri ini sudah ditopang oleh bahan-bahan pokok (*wage goods*) yang cukup.

Dari sudut politik, swasembada bahan makanan di Indonesia akan menimbulkan harga diri (*dignity*) dan kekuatan dalam posisi tawar menawar Indonesia yang dipercayai akan memberikan efek positif dalam hubungan ekonomi dan politik dengan pihak luar negeri. Juga swasembada bahan makanan akan menimbulkan kemerdekaan dalam mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi maupun keputusan politik. Dengan perkataan lain, penghapusan ketergantungan bahan makanan terhadap luar negeri adalah merupakan sasaran yang ditopang oleh alasan ekonomis maupun politis.

Penggunaan teknik produksi pertanian yang mengambil pola teknik produksi pertanian di negara-negara maju di sektor pertanian tradisional telah dan akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi ekonomis dan ekologis. Kontradiksi-kontradiksi ekonomis yang telah dan akan timbul ialah:

- a. Terlemparnya banyak orang dari sistem produksi di sektor pertanian tradisional

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, sistem produksi pertanian padat modal dan proses interaksi sosial yang mengiringinya telah mengakibatkan tersingkirnya banyak orang dari sistem produksi di sektor pertanian tradisional. Dan orang-orang yang tersingkir ini ternyata juga sebagian besar telah tidak diserap dalam pekerjaan-pekerjaan yang stabil dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Penerapan teknik produksi padat modal di sektor pertanian tradisional Indonesia.

Secara terus-menerus dan intensif dipercayai akan menaikkan tingkat produksi bahan makanan sebagai akibat meningkatnya tingkat produktivitas per hektar tanah pertanian. Data produksi beras dan areal tanaman untuk produksi beras telah menunjukkan kenaikan produktivitas per hektar dalam periode 1968-1978 yaitu dari 1,45 ton per hektar pada tahun 1968 menjadi 1,98 ton per hektar pada tahun 1978. Tetapi kenaikan produksi ini telah dibayar dengan pengangguran tenaga kerja atau tersingkirnya banyak tenaga kerja dari sistem produksi bahan makanan ini. Situasi ini akan berjalan terus bersamaan dengan meluasnya mekanisasi pertanian. Jutaan dan kemudian puluhan juta proletariat desa akan menyesakkan desa dan kota.

Pertambahan produksi bahan makanan tidak dapat dinikmati oleh banyak orang di sektor pertanian tradisional oleh karena permintaan efektif mereka telah terganggu akibat tersingkirnya mereka dari sistem produksi di sektor pertanian tradisional ini. Kasus-kasus kelaparan yang dilaporkan beberapa waktu yang lalu adanya kekurangan gizi yang parah di daerah pedesaan adalah petunjuk-petunjuk mengenai ini. Oleh karena bagian buruh dalam nilai produksi telah menurun dan juga upah riil buruh juga telah menurun seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka terjadilah pengalihan permintaan efektif dari massa rakyat buruh tani kepada pihak-pihak yang menguasai produksi bahan makanan yaitu petani-petani kaya dan unsur-unsur kota yang terdiri dari pedagang, importir mesin, birokrat dan lain-lain.

- b. Tingginya intensitas impor dalam produksi bahan makanan
- Teknologi produksi yang diterapkan di Indonesia dalam sektor pertanian tradisional selain berbentuk teknologi produksi yang padat modal juga berbentuk penggunaan bibit unggul yang menghendaki pupuk dan pestisida yang relatif lebih banyak. Oleh karena mesin-mesin pertanian seluruhnya diimpor, maka intensitas impor barang-barang modal ini dalam produksi beras di Indonesia tentulah boleh dikatakan 100 persen, demikian juga halnya dengan pestisida. Pupuk kimia yang sudah diproduksi di Indonesia ternyata mengandung "import content" sebesar 78 persen. Berdasarkan angka-angka ini besar

kemungkinan dapat dikatakan bahwa sebagian besar biaya produksi beras di Indonesia dengan teknologi produksi seperti yang interdi atas terdiri dari komponen-komponen biaya yang interimpornya tinggi sehingga produksi beras itu sendiri mengandung intertambah yang sebagian besar keluar dari Indonesia. Dengan perkataan, teknologi produksi beras yang mengandung inter impor yang tinggi pada hakikatnya telah mengakibatkan Indonesia mengekspor permintaan efektif keluar negeri. Kontradiksi yang mengandung dalam pengertian ini ialah bahwa kenaikan produksi pertanian di sektor pertanian tradisional telah memperbaiki permintaan efektif pihak-pihak di luar negeri dan bukan permintaan efektif massa rakyat di mana produksi itu berlangsung. Kontradiksi ekologis telah diterangkan oleh Diwan sebagai berikut: Teknologi produksi yang menggunakan banyak pupuk kimia dan pestisida sebagai akibat penggunaan bibit unggul akan menimbulkan permasalahan pesisida yang terus-menerus dalam jumlah dosis yang bertambah pula. Ini disebabkan pemakaian pestisida hanya memusnahkan hama yang paling lemah daya tahannya, tetapi tidak mematikan hama yang kuat daya tahannya. Hama yang tidak musnah dan kuat daya tahannya ini terus berkembang dan penyemprotan obat anti hama terhadap hama jenis ini justru mengakibatkan hama ini lama kelamaan menjadi lebih kuat daya tahannya, karena sudah kebiasaan disemprot obat anti hama.

Di beberapa negara obat-obat anti hama seperti *ehlorinated hydrocarbons*, organik *phosphates* dan *carbonates* terbukti telah tidak mampu lagi membasmi hama. Beberapa jenis obat anti hama malah telah merusakkan dan mematikan beberapa jenis tanaman tertentu. Pupuk kimia nonorganik seperti nitrates dan phosphates larut dalam air, sehingga menyebabkan air menjadi tempat subur bagi algae (sejenis tanaman air) untuk berkembang. Tanaman air ini menghisap oksigen dalam jumlah banyak sehingga oksigen yang tinggal untuk ikan menjadi sangat berkurang yang mengakibatkan matinya ikan. Berkurangnya ikan yang diperoleh dari selokan-selokan di daerah

pertanian padi yang banyak menggunakan pupuk kimia ini adalah bukti-bukti mengenai ini. Sementara itu, seperti juga pestisida, penggunaan pupuk kimia juga terus bertambah dalam jumlah yang bertambah besar untuk suatu luas tanah pertanian tertentu oleh karena pupuk kimia ini memperlonggar, lingkaran nitrogen (*nitrogen cycle*) di dalam tanah. Pupuk kimia yang digunakan juga akhirnya menimbulkan kontaminasi terhadap lingkungan.

Dengan produktivitas naik dan hancurnya sistem ekologi membentuk kontradiksi ekologis yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi pertanian seperti yang disebutkan di atas, apakah implikasi kontradiksi-kontradiksi ekonomis dan ekologis ini bagi kebijaksanaan produksi di sektor pertanian bahan makanan di Indonesia? Implikasinya, perlunya suatu pemikiran ulang atau suatu pertimbangan serius untuk kembali kepada teknologi tradisional dan penggunaan bibit tradisional, tetapi dengan areal pertanian yang lebih luas dengan membuka tanah-tanah pertanian di luar Jawa yang baru sebagian kecil dikerjakan. Meskipun demikian mendinamiskan sektor tradisional di Indonesia pertama sekali harus dengan menata hubungan produksi di sektor ini dan bukan dengan mengkapitaliskan sektor ini secara drastik dengan pola padat modal.

Rangkaian thesis mengenai keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir seperti Paul Baran, Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Samir Amin dan Ranjit Sao yang telah mendasarkan pemikiran-pemikiran mereka atas realitas-realitas sosial yang ada di negara-negara Dunia Ketiga. Realitas-realitas sosial ini yang utama ialah struktur sosial yang pincang dan struktur ekonomi yang berat sebelah (*lopsided*) sebagai akibat hubungan sosial yang feodalistis dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan kolonial di negara-negara ini pada waktu negara-negara ini berada dalam status jajahan. Bangunan struktural yang seperti ini telah dijadikan pangkal bertolak dalam menganalisa ketergantungan dan keterbelakangan (yang telah menunjukkan gejala-gejala permanen

pada negara-negara Dunia Ketiga) oleh pemikir-pemikir yang tersebut di atas dan oleh pemikir-pemikir lain dari negara-negara Dunia Ketiga. Bangunan struktural yang telah dijadikan pangkal bertolak dalam analisa thesis ketergantungan dan keterbelakangan adalah juga bangunan struktural yang terdapat di Indonesia yang telah diwarisi Indonesia pada waktu Indonesia mencapai kemerdekaan politiknya dan bangunan struktural ini telah kita jadikan pangkal bertolak dalam menganalisa proses perkembangan ekonomi di Indonesia sejak pemerintah "pasca 1966" memegang tampuk kekuasaan politik. Dinamik perkembangan ekonomi Indonesia selama ini telah menghasilkan pertumbuhan tinggi untuk sekelompok kecil orang, kemiskinan untuk banyak orang, tetapi ketergantungan untuk semua pertumbuhan tinggi yang dinikmati oleh sekelompok kecil orang ini adalah merupakan pertumbuhan dengan ketergantungan (*dependent development*) dan kemiskinan yang diderita oleh banyak orang ini adalah merupakan produk dari ketergantungan yang telah diikuti dengan suatu proses pertukaran yang tidak adil dan pencangkakan sistem produksi asing dan hubungan sosial yang mengiringinya yang telah menyingkirkan banyak orang dari sistem produksi di mana mereka selama ini berada, berfungsi dan memperoleh nafkah. Proses tersingkirnya banyak orang dari sistem produksi di mana mereka selama ini berfungsi telah pula tidak diikuti dengan suatu proses penyerapan mereka dalam sistem produksi baru yang bernama industri modern karena sistem produksi baru ini adalah suatu sistem produksi yang tidak pro buruh. Sistem produksi ini tidak pro buruh, oleh karena sistem produksi ini bersifat padat modal dan merupakan hasil perkembangan teknologi untuk menggantikan buruh. Proses substitusi untuk mengurangi komponen buruh dalam sistem produksi ini adalah hasil dari suatu sistem sosial di negara-negara maju yang tidak mempunyai situasi surplus tenaga kerja di sektor pertanian darimana proses transformasi dimulai. Proses industrialisasi dengan dinamika sistem produksi yang seperti ini dan dalam konteks tidak adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan

merupakan sektor dari mana proses transformasi bergerak bukan hanya telah menimbulkan naiknya produktivitas per pekerjaan di sektor pertanian, tetapi juga naiknya produktivitas per pekerja di sektor industri dan nonpertanian secara keseluruhan. Namun demikian dalam proses transformasi ini sebagai akibat penyerahan bulat-bulat penentuan alokasi sumber-sumber kepada kekuatan pasar atau "invisible hand", proses transformasi ini terbukti telah mengalami biaya-biaya sosial yang cukup tinggi pula.

Pelaksanaan proses industrialisasi dengan sistem produksi yang tidak pro buruh dan dalam situasi adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian ditambah pula dengan kelemahan-kelemahan struktural lainnya dalam sistem sosial sudah jelas secara logis bukan merupakan proses transformasi apalagi proses ini telah pula mengganggu keseimbangan yang ada dalam industri-industri rakyat sehingga hancurnya banyak industri-industri rakyat ini. Dalam hubungan ini menarik untuk mengutip pendapat Professor Joan Robinson, seorang ekonom Inggris, yang pada beberapa tahun belakangan ini telah terampil memperkuat barisan pemikir ekonomi pembangunan yang berpijak atas realitas-realitas sosial yang ada di negara-negara Dunia Ketiga. Joan Robinson mengemukakan sebagai berikut:

(Bagi negeri-negeri Dunia Ketiga untuk membasmi kemiskinan melalui proses industrialisasi berdasarkan pola Barat adalah sama sekali salah. Betul negeri-negeri ini membutuhkan akumulasi surplus tetapi negeri-negeri ini hendaklah mengarahkan proses akumulasi ini dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan situasi mereka).

Pemikiran Joan Robinson ini yang juga merupakan pemikiran ekonom-ekonom strukturalis dari **Dunia Ketiga** yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada faham-faham neo klasik ternyata telah bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam proses industrialisasi di Indonesia. Proses industrialisasi di Indonesia jelas adalah proses industrialisasi berdasarkan pola Barat yang tidak berlandaskan realitas-realitas sosial yang ada di Indonesia sehingga proses ini ditambah dengan sifatnya yang tergantung kepada impor

seperti telah dikemukakan dalam bab terdahulu telah membuka *phase* dan bentuk baru dalam sektor "*enclave*" di Indonesia, yaitu sektor ekonomi yang pada hakikatnya "*terasing*" dari kehidupan masyarakat rakyat baik dilihat dari penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan mereka (dilihat dari persentase jumlah golongan pendapatan tinggi, industri-industri modern ini lebih melayani kebutuhan golongan pendapatan tinggi ini) maupun dari segi penyerabaran ketrampilan yang dapat menimbulkan mobilitas sosial. Dalam proses pembinaan dan perluasan "*enclave*" baru ini melalui industrialisasi, pada hakikatnya proses ekonomi Indonesia adalah lanjutan dari proses yang sudah dibina oleh pemerintahan kolonial Belanda melalui pelaksanaan *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) dan pengerahan modal swasta Belanda dan asing lainnya dalam sektor perkebunan komoditi primer dan pertambangan yang merupakan dua bentuk "*enclave*" dalam zaman penjajahan Belanda.

Cultuurstelsel telah membina secara paksa pembentukan sektor perkebunan tanaman ekspor yang merupakan *phase* pertama dari proses pembentukan secara sistematis sektor "*enclave*" di Indonesia. Perluasan perkebunan besar di Jawa dan Sumatra Timur sesudah *Cultuurstelsel* berakhir ditambah dengan pembinaan produksi di sektor pertambangan adalah *phase* kedua dari proses pembentukan sektor "*enclave*" dan proses industrialisasi yang sangat bergantung kepada impor dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan di atas dan dalam bab sebelumnya adalah *phase* ketiga dari pembentukan sektor "*enclave*" di Indonesia. *Phase* ketiga ini selain merupakan lanjutan dari *phase-phase* sebelumnya adalah merupakan *phase* yang dipelopori oleh bangsa Indonesia sendiri untuk membedakannya dari *phase-phase* sebelumnya yang dipelopori oleh bangsa asing. Sejarah ekonomi Indonesia sampai saat sekarang ini boleh dikatakan merupakan sejarah pertumbuhan sektor *enclave* dan bukan sejarah pertumbuhan ekonomi massa rakyat. Dan strategi dan rangkaian kebijaksanaan ekonomi yang dianut dan dijalankan pada hakikatnya adalah strategi dan rangkaian

kebijaksanaan ekonomi yang memperkuat keseluruhan sektor *enclave* ini.

Oleh karena keseluruhan sektor *enclave* ini berorientasi keluar negeri baik ditinjau dari sudut *input* maupun permintaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagian Besar berkonsentrasi di sektor-sektor *enclave* ini ditambah pula kebutuhan untuk menumbuhkan sektor-sektor *enclave* ini dengan cara pembiayaan dari luar negeri baik berupa investasi asing secara langsung maupun berupa pinjaman luar negeri untuk membiayai infrastruktur bagi memudahkan dan menopang pertumbuhan sektor-sektor ini, maka terjadilah di Indonesia situasi-situasi yang berikut seperti yang telah dialami oleh negara-negara Amerika Latin:

Disparitas pendapatan di antara sektor modern di mana sebagian kecil rakyat berada dengan sektor pertanian tradisional di mana sebagian besar rakyat berada dan menggantungkan hidupnya menjadi bertambah lebar. Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan pun bertambah lebar bersamaan dengan tersisihnya sebagian besar rakyat dari proses pembangunan dalam pengertian mereka tidak turut menikmati pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena sistem produksi di sektor-sektor *enclave* yang telah dijadikan sebagai "*leading sectors*" bersifat padat modal, maka surplus tenaga kerja yang terdapat di sektor pertanian tradisional tidak dapat ditampung secara berarti apalagi setelah memperhatikan matinya banyak industri-industri rakyat sebagai akibat dinamik industrialisasi di sektor modern. Porsi nilai tambah sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto yang kemudian menurun tidaklah dapat dikatakan sebagai pertanda "*transformasi*" dalam struktur ekonomi seperti yang dimaksudkan dalam literatur ekonomi pembangunan oleh karena situasi ini tidak diikuti oleh meningkatnya produktivitas per pekerja di sektor pertanian dan juga tidak diikuti dengan adanya suatu mobilitas sosial yang dialami oleh para pekerja yang sempat tertampung dalam sektor industri oleh karena pada hakikatnya mereka ditampung dalam apa yang disebut "*secondary*

labour market" (pasar tenaga kerja yang sekunder) yaitu pasar tenaga kerja dengan upah yang rendah, keterampilan yang rendah dan prospek karier yang tidak menentu. Ini sejajar dengan salah satu modal bagi masuknya modal asing untuk tujuan investasi di sektor industri yaitu untuk memperoleh buruh murah.

Peranan pembiayaan luar negeri baik yang berupa modal asing untuk tujuan investasi langsung maupun pinjaman luar negeri adalah untuk menutupi "*foreign exchange gap*" yang didasarkan kepada "*two gap model*" yang telah disodorkan oleh beberapa sarjana ekonomi Barat. Dalam hal ini, maka keseluruhan modal luar negeri ini telah berfungsi untuk membiayai surplus impor dalam perkiraan yang sedang berjalan (*current account*) dalam neraca pembayaran. Dalam situasi seperti ini, maka Indonesia telah membuka secara seluas-luasnya kesempatan bagi pihak asing. Kedua situasi yang tersebut di atas yaitu sangat tidak seimbang nilai modal asing yang masuk dengan nilai pendapatan investasi yang keluar dan menurunnya kemampuan impor pinjaman luar negeri bersih telah menjuruskan Indonesia ke dalam situasi ketergantungan keuangan yang terus-menerus dan bertambah dalam apalagi cadangan devisa yang terkumpul banyak terdiri pula dari komponen hutang.

Hubungan ketergantungan terhadap luar negeri telah menghasilkan pula keputusan untuk menerapkan teknologi produksi yang tidak pro buruh di sektor pertanian tradisional di mana surplus tenaga kerja yang sudah berakumulasi sejak puluhan tahun telah menunggu. Bukan menunggu untuk diserap dalam sistem produksi yang baru tetapi menunggu untuk disingkirkan. Studi-studi yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya telah menunjukkan phase baru dalam situasi kehidupan di pedesaan yaitu *phase* pemiskinan masal. Dalam *phase* pemiskinan masal ini, surplus ekonomi terus menerus beralih dari masa rakyat tani ke pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan untuk membawa dan melaksanakan sistem produksi yang tidak pro buruh. Mereka itu adalah produsen mesin-mesin dan alat-alat pertanian, importir pupuk kimia dan pestisida, distributor

alat pertanian, distributor pupuk kimia dan pestisida, para birokrat dan penguasa di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa) yang telah melakukan peranan mulai dari peranan calo atau perantara, pengambil keputusan dan pelaksana lapangan, para rettenir, pihak-pihak yang menguasai unit-unit produksi di sektor pertanian tradisional dan berbagai pihak lain yang langsung atau tidak langsung ikut dalam mengantarkan dan melaksanakan teknologi produksi yang tidak pro buruh ini di sektor pertanian tradisioanal. Surplus dari sektor pertanian tradisional pun beralih mula-mula ke strata atas dalam masyarakat dalam sektor pertanian tradisional yang terdiri dari golongan petani kaya, tuan tanah dan elite penguasa di pedesaan, kemudian beralih ke kapitalis-kapitalis dagang yang menguasai jaringan impor dan distribusi, birokrat dan penguasa di atas tingkat desa sampai tingkat nasional dan akhirnya beralih kepada produsen mesin, alat pertanian dan *input* pertanian lainnya yang hampir seluruhnya berada di luar negeri. Oleh karena kelas buruh hanya menerima sebagian kecil saja dari keseluruhan nilai produksi yang dihasilkan, dan bagian inipun telah terus berkurang, maka proses ini tidak lain adalah merupakan proses eksploitasi atas rakyat di sektor pertanian tradisional.

Hipotesa utama yang telah dikemukakan dalam thesis ketergantungan dan keterbelakangan yaitu adanya suatu proses pertumbuhan tinggi dengan ketergantungan untuk sebagian kecil penduduk dan adanya proses pemiskinan sebagian besar penduduk sebagai akibat proses ketergantungan keuangan dan teknologi yang secara terus menerus mengalihkan surplus ekonomi dari masa rakyat ke pihak luar negeri melalui kollaboratornya-kollaboratornya di Indonesia. Kollabolator-kollaborator ini sadar atau tidak sadar telah membentuk Aliansi sesama mereka dalam melaksanakan pengalihan surplus ekonomi dari masa rakyat ini. Golongan dan kelas dalam struktur masyarakat Indonesia yang telah merupakan komponen-komponen dalam proses interaksi dalam sistem ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

4. Borjuis Industri Domestik
5. Kapitalis Dagang
6. Borjuis Kecil

Dalam melaksanakan operasi di dalam negeri pihak kapitalis adakalanya berpatungan dengan borjuis industri domestik secara kontrol sehingga Aliansi dengan golongan ini menjadi tidak perlu. Banyak Aliansi dengan golongan ini memerlukan oknum birokrat atau penguasa sehingga Aliansi dengan mereka untuk duduk dalam organisasi kejadian pihak kapitalis asing menjadi Aliansi yang lam atau oknum yang dekat dengan mereka di Indonesia sehingga Aliansi di antara usaha yang mereka dirikan dengan birokrat dan penguasa menjadi Aliansi yang kapitalis asing dengan birokrat dan borjuis kecil yang menguasai jaringan Golongan kapitalis dagang dan borjuis kecil yang menguasai jaringan distribusi adalah merupakan *partner* pihak kapitalis asing ini dalam memasarkan barang-barang yang telah mereka produksi.

Aliansi di antara borjuis industri domestik, tuan tanah, petani sedang dan kaya dan birokrat dan penguasa.

Borjuis industri domestik mengucapkan terima kasih kepada tuan tanah, petani sedang dan kaya, dan birokrat dan penguasa atas jasa-jasanya mereka untuk menyingkirkan banyak orang dari sistem produksi di sektor pertanian tradisional sebagai akibat aktifnya golongan-golongan ini dalam proses melaksanakan teknologi produksi yang tidak proburuh di sektor pertanian tradisional ini sehingga orang-orang yang tersingkir ini menjadi proletariat desa untuk kemudian menjadi sumber buruh murah untuk industri-industri di sektor modern. Oleh karena proletariat desa ini tidak punya alternatif lain di sektor pertanian tradisional maupun di sektor nonpertanian di pedesaan, maka mereka ini akan bersedia untuk menerima upah yang rendah di industri-industri di sektor modern. Sementara itu, tuan tanah, petani sedang dan kaya dan birokrat beserta penguasa adalah golongan-golongan yang menyediakan pasaran utama bagi barang-barang

International Strukturalist

yang diproduksi oleh borjuis industri domestik ini. Di sini borjuis kecil ikut memegang peranan dalam distribusi.

Aliansi di antara kapitalis asing, tuan tanah, petani sedang dan kaya, dan birokrat dan penguasa

Kapitalis asing juga mengucapkan terima kasih kepada tuan tanah, petani sedang dan kaya, dan birokrat dan penguasa atas jasa-jasa mereka dalam melahirkan golongan proletariat desa sebagai sumber buruh murah. Kapitalis asing mengucapkan terima kasih kepada golongan-golongan ini oleh karena golongan-golongan inilah yang merupakan pembeli-pembeli utama barang-barang yang mereka produksi yang antara lain disalurkan melalui borjuis kecil.

Aliansi di antara borjuis industri domestik, kapitalis dagang, borjuis kecil, dan birokrat dan penguasa.

Borjuis industri domestik memerlukan kapitalis dagang untuk memasarkan barang-barang mereka dan banyak kejadian borjuis industri domestik ini adalah juga golongan-golongan kapitalis dagang yang dulunya bergerak dalam bidang impor. Borjuis kecil yang terdiri dari pedagang-pedagang perantara juga turut menjadi pihak-pihak yang melakukan kegiatan distribusi baik sebagai agen kapitalis-kapitalis dagang maupun secara lepas. Birokrat dan penguasa banyak kejadian pula selain membantu di bidang perizinan dan fasilitas juga menjadi peserta dalam unit-unit industri yang dikuasai oleh borjuis industri domestik ini sehingga tempo Aliansi mereka menjadi panjang.

Aliansi di antara birokrat dan penguasa dengan kapitalis dagang dan borjuis industri domestik.

Para birokrat dan penguasa sebagai akibat berbagai transaksi dalam proses ekonomi yang harus dijalankan melalui pemerintah telah meraih banyak manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini dalam bentuk modal yang terkumpul telah mendorong mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak kapitalis dagang dan borjuis industri domestik untuk memutarakan modal yang terkumpul ini dalam bentuk usaha-usaha. Timbullah kelas birokrat pengusaha dan pengusaha pengusaha. Dalam melakukan Aliansi

ini, para birokrat dan pengusaha baik secara terbuka atau tersembunyi memilih partner yang umumnya terdiri dari pengusaha dari golongan nonpribumi, sehingga apa yang terkenal di Indonesia sebagai "pencukongan" tumbuh dengan subur. Situasi Aliansi ini ditambah pula dengan pelayanan yang relatif lebih baik terhadap golongan nonpribumi ini oleh birokrat dan penguasa dipercayai telah menempatkan golongan ini pada posisi yang jauh lebih baik di keseluruhan sektor swasta dalam sektor modern seperti industri, perdagangan, impor ekspor, jasa-jasa keuangan, pengangkutan dan konstruksi, sehingga kedudukan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda pada zaman penjajahan Belanda dahulu secara lebih luas kembali mereka nikmati sesudah Indonesia merdeka pada waktu golongan pribumi memegang kekuasaan politik. Tetapi sementara itu golongan nonpribumi ini secara sadar atau tidak telah ditempatkan oleh pihak penguasa dalam posisi yang "berbahaya" oleh karena posisi mereka ini dalam keadaan kemelaratan rakyat yang parah ditambah pula dengan kedudukan mereka sebagai minoritas telah dan akan merupakan sasaran utama dalam kerusuhan sosial yang timbul akibat kemelaratan. Dalam hal ini golongan nonpribumi adalah merupakan "korban" (*victim*) dari suatu sosial *fabric* yang dibuat oleh penguasa sebagai aktor. Kalau selama ini pengarang tulisan ini secara tidak henti hentinya menganjurkan agar kekuasaan ekonomi di sektor swasta harus diusahakan berada di tangan golongan pribumi dengan suatu proses yang wajar tanpa mengganggu upaya dan keuletan golongan nonpribumi dalam kegiatan-kegiatan secara wajar dan proses penyatuan golongan nonpribumi ini keadaan masyarakat Indonesia secara ikhlas adalah justru untuk menyelamatkan golongan nonpribumi ini, sehingga mereka tidak lagi berada dalam "kotak yang berbahaya", tetapi menyatu dengan masyarakat pribumi Indonesia dalam suka dan duka.

Inilah bentuk aliansi-aliansi utama yang terdapat di Indonesia yang telah menjalankan proses pengalihan surplus ekonomi dari massa rakyat ke golongan yang berada dalam sektor modern dan disentrum kekuasaan untuk seterusnya keluar negeri bagi kepentingan kapitalis-konvensional. Hadimnya birokrasi dan penguasa sebagai kor

ahansi telah menimbulkan pula suatu proses dalam kehidupan ekonomi yang mengandung distorsi-distorsi yang mengganggu kewajaran yang dipercayai bernilai deskriptif terhadap keseluruhan sistem ekonomi dan prosesnya. Dalam hubungan ini Sritua Arief dan Adi Sasono (1981) mengemukakan:

"Berbarengan dengan proses pertumbuhan ekonomi yang sifatnya sektor modern sentries dan kota *centris* seperti yang telah diterangkan di muka, maka proses pertumbuhan ini juga diwanai oleh pola tingkah laku penguasa dan keseluruhan birokrasi Pemerintah, yang tidak wajar sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dalam jalannya proses ekonomi. Adapun distorsi-distorsi itu adalah:

1. Penghisapan *parasitic* atas sumber-sumber nasional oleh pihak-pihak dari sentrum kekuasaan dan dari keseluruhan birokrasi Pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara. Penghisapan parasitis atas sumber-sumber nasional ini dipercayai mengakibatkan beban nasional yang relatif ditanggung sebagian besar oleh massa rakyat. Pergeseran pendapatan yang antisosial (*antisosial income shift*) yang terjadi sebagai akibat penghisapan parasitis sumber-sumber nasional oleh kelompok orang dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara dipercayai telah menjadi salah satu penyebab utama bagi kenaikan harga barang-barang keperluan rakyat.
 2. Proses monopolisasi kesempatan dan fasilitas oleh kelompok-kelompok pengusaha swasta yang berkolaborasi dengan orang-orang dari sentrum kekuasaan dan birokrasi pemerintah, fenomena ini kemudian menimbulkan pula pemberian dispensasi-dispensasi dan *privilege-privilege* tertentu bagi perusahaan-perusahaan yang berbentuk dari hasil kolaborasi ini sehingga kompetisi menjadi tidak sehat. Kesemuanya ini (monopoli fasilitas dan kesempatan) tentu mengakibatkan proses akumulasi manfaat ekonomi jatuh kepada segelintir atau segolongan kecil orang saja.
- Situasi *wig chaotic* antara apa yang secara kepentingan ekonomi nasional sudah diputuskan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keputusan-keputusan teknokratis yang rasional untuk kepentingan

- ekonomi nasional sering sekali tidak menjadi kenyataan dalam praktik oleh karena dalam praktik bermain suatu proses yang secara alami dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan.
4. Tidak terarahnya penjurusan investasi. Sebagai akibat manajemen ekonomi yang *chaotic* seperti yang disebutkan dalam point 3, maka skala prioritas dalam penjurusan investasi dalam situasi keterbatasan dana investasi menjadi tidak menentu.

Proses ekonomi Indonesia dapat juga diterangkan dengan model Sirkuit seperti yang baru-baru ini dikemukakan oleh Kuriien. Model ini membagi sistem ekonomi dalam dua sistem yaitu sistem Ekonomi Kebutuhan (*Need Based Economy*) dan Sistem Ekonomi Kemauan (*Want Based Economy*). Interaksi sistem ini membentuk inti proses ekonomi disebagian besar negara-negara di Dunia Ketiga yang telah menyebabkan keterbelakangan dan kemiskinan pada sebagian besar penduduk di negara-negara ini.

Sistem ekonomi kebutuhan adalah sistem ekonomi pedalaman dengan ciri utama yaitu proses untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia oleh karena rendahnya pendapatan per kapita dalam sistem ini belum memungkinkan sebagian besar penduduk di sini bergerak ke arah pemenuhan kemauan. Pada permulaan sejarah perkembangannya, sistem ekonomi kebutuhan bergerak mengikuti dinamikanya sendiri di mana surplus yang diperoleh tidak digunakan untuk mengakumulasi surplus yang lebih banyak pada periode produksi berikutnya. Surplus yang diperoleh, yang umumnya sebagian besar mula-mula jatuh ke kelas penguasa feodal sebagai akibat penguasaan tanah dan pembayaran upeti, digunakan untuk membiayai kelompok disekitar kelas penguasa feodal ini, membiayai produksi barang-barang mewah untuk keperluan kelas penguasa feodal ini (ini merupakan tahap dasar perkembangan industri kerajinan rakyat di desa-desa) dan membiayai pembinaan dan pemeliharaan harta-harta yang tidak produktif seperti monumen-monumen dan istana-istana. Satu-satunya harta produktif yang dibiayai oleh surplus ini ialah sistem irigasi pedesaan. Oleh k...

proses penggunaan surplus ini mengandung suatu proses yang padat karya. Maka akhirnya banyak daripada surplus yang diperoleh oleh kelas penguasa feodal beralih ke massa rakyat. Proses ekonomi yang berjalan dalam sistem ekonomi kebutuhan disebut dengan istilah Sirkuit N yang terdiri atas Sirkuit N Atas dan Sirkuit N Bawah.

Sirkuit N Atas menyangkut kelas penguasa feodal dan golongan elite lainnya sedangkan Sirkuit N Bawah menyangkut massa rakyat. Proses interaksi yang terjadi di antara Sirkuit N Atas dengan Sirkuit N Bawah pada tahap permulaannya bukanlah merupakan proses ekonomi dalam pengertian proses produksi dan reproduksi untuk tujuan akumulasi modal, tetapi proses interaksi ini tak lain adalah merupakan proses di antara penguasa dengan massa rakyat untuk tujuan mengampu penguasa dan menopang penguasa bagi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan kemauan-kemauannya. Dalam kurun waktu yang berjalan, sistem ekonomi kebutuhan ini akhirnya mengalami kontak dengan sektor modern yang mewakili sistem ekonomi kemauan. Sistem ekonomi kemauan adalah sistem yang mengandung relatif banyak penduduk yang mempunyai pendapatan per kapita yang relatif tinggi yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga mereka sudah bergerak untuk menimbulkan permintaan efektif akan barang-barang bagi memenuhi kemauan mereka yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kemauan merupakan sistem ekonomi modern di mana surplus diraih oleh golongan kapitalis untuk tujuan akumulasi surplus yang lebih besar pada periode-periode produksi berikutnya dengan cara reinvestasi surplus secara terus-menerus. Apa-apa yang dikemukakan dalam studi ini yang menggambarkan secara jelas proses pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan Pasca 1966 yang pada hakikatnya bersifat pertumbuhan dengan ketergantungan *independent development* yang diiringi dengan proses pemiskinan massal, mengandung implikasi bagi perlunya suatu strategi alternatif untuk memutar proses ini menuju ke suatu jenis pertumbuhan yang otonom (*autonomous development*). Strategi alternatif yang dimaksud hendaklah diselenggarakan berdasarkan realitas-realitas sosial yang ada sehingga

proses penyingkiran massa rakyat dari sistem produksi tidak berjalan bersama dengan itu proses akumulasi yang berjalan ke luar negeri, mengalihkan begitu banyak surplus ekonomi keluar negeri, alternatif ini akan langsung menunjukkan perhatian kepada masalah "persoalan" yaitu struktur ekonomi itu sendiri, proses interaksi sosial ekonomi itu dan struktur sosial beserta proses interaksi sosial ekonomi itu sehingga strategi alternatif ini akan merupakan strategi untuk melaksanakan transformasi sosial, karena inilah esensi suatu perkembangan ekonomi.

Strategi alternatif tidak mengalami pertumbuhan, tetapi anti kepada pertumbuhan yang didasarkan kepada prioritas yang salah. Strategi alternatif harus memberikan prioritas utama kepada menaikan permintaan efektif di dalam negeri dan bukan permintaan efektif pihak luar negeri. Strategi alternatif tidak anti hubungan ekonomi dengan luar negeri, tetapi anti kepada hubungan yang membebankan dengan ketergantungan karena sifat hubungan yang seperti ini dalam jangka panjang akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi yang akan tidak membaikkan kepada semua pihak. Kebudayaan dunia harus menuju kepada tata hubungan yang adil antara bangsa-bangsa di mana setiap bangsa mempunyai "dignity" dalam kebudayaan dunia ini ingin disebut sebagai suatu *civilization*, dan semua negara terutama negara-negara maju yang sekarang ini mempunyai posisi yang lebih baik dalam tata hubungan ekonomi internasional, harus *concerned* terhadap kemiskinan bangsa-bangsa di negara-negara Dunia Ketiga dan harus aktif langsung atau tak langsung dalam melakukan koreksi terhadap proses eksploitasi terhadap massa rakyat di negara-negara Dunia Ketiga ini sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dalam masyarakat dunia.

Sementara itu dalam proses kehidupan negara pada dasawarsa 70-an yang lalu, peran serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik Nampak melemah, tatkala peranannya dalam proses ekonomi makin mengecil. "Kue *national*" membesar, sementara pengelolaan dan

penilikannya makin memusat. Ekspansi aparat pemerintah dan birokrasi telah menjalar ke segala bidang. Rakyat seolah kehilangan prakarsa dan inisiatif, menjadi terlalu bergantung pada pemerintah, mengharapkan segala sesuatu dari atas. Anggaran pemerintah, diharapkan karena berkembangnya tuntunan-tuntunan baru. Masalah lain yang timbul adalah kemampuan birokrasi pemerintah itu sendiri, dalam memikul beban yang mungkin terlalu berat dan berkembang terlalu besar dan terlalu cepat. Sementara itu kekuatan kontrol masyarakat sudah semakin lemah. Korupsi cenderung makin melembaga dan membudaya. Persoalan lanjutan yang dapat disimpulkan pula dari kajian ini adalah, bahwa orientasi kepada pendekatan alternatif, ke arah pemerataan dan swadaya, mempunyai dimensi majemuk di dalam implementasinya yang perlu di dalam dengan seksama. Pertama, ia bukan masalah ekonomi yang bersifat otonom. Ia akan menyangkut penataan kembali pranata sosial ekonomi di masyarakat. Dan ia membutuhkan prasyarat politik untuk dapat menyelenggarakannya. Elite primer yang menguasai kendali pemerintahan dan elite sekunder yang mendukungnya, telah tersandera oleh "gaya hidup mewah", karenanya mereka akan mengusahakan dengan segala cara, pemeliharaan status quo. Kedua, ia menyangku hubungan antar negara, dalam kaitan ekonomis maupun politis. Dan sebagai aliran yang sudah mapan, yang selama ini dipandang memberikan keuntungan politis dan ekonomis terhadap negara atau kelompok negara-negara, atau kepada sesuatu kelompok kepentingan ekonomi multinasional, maka penyelenggarakannya tentunya tidak mudah dan sederhana. Ketiga, sebagai persoalan strategi pembangunan, maka orientasi kepada pemerataan dan swadaya, memerlukan perencanaan yang bersifat khas bagi setiap negara. Artinya tidak ada suatu model pembangunan dalam pembangunan dalam orientasi ini, yang dapat berlaku umum bagi setiap negara berkembang.

Harapan dan keberhasilan bangsa Indonesia di dalam menyelenggarakan reformasi struktural dalam proses perkembangan masyarakat di masa datang, akan tergantung pada dua upaya pokok:

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua dan Sasono, Adi. 1981. *Indonesia; Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Budiman, Arif. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Dos Santos, Theotonio. 1970. "The Structure of Dependence" *The American Economic Review*. Vol. 60, No. 2, Papers and Proceeding of the Eighty-Second Annual Meeting of the American Economic Association.
- Fagen, Richard R. 1977. "Studying Latin American Politics: Some Implications of a Dependencia Approach". *Latin American Research Review* 12.
- Frank, Andre Gunder. 1984. *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Hoogvelt, Angkie. 1995. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta CV. Rajawali.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kasnawi, M. Tahir and Ramli AT. 2015. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Oxaal, Ivar (etc, Eds). 2010. *Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa*. London. Routledge. *etc* published.
- Sukarniati, Lestari, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Tantangan di Negara Berkembang*. Yogyakarta: UAD Press.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taryono, 2012. *Modul 1: Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wibowo, Kodrat. 2012. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi: Kerangka Teoritis dan Aplikasinya*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Zulkarnain, 2010. Serba-serbi Tanam Paksa, *Jurnal Pendidikan dan Sejarah ISTORIA*. Universitas Negeri Yogyakarta. Volume VIII Nomor 1.